



**Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengaturan Transportasi Publik Kota Surabaya:
Studi Perkotaan Program Suroboyo Bus**

(M. Bayu Winaryo)

**Konsolidasi Gerakan Milenial Indonesia dalam Upaya Memenangkan Pasangan Prabowo
– Sandiaga Uno dalam Pemilihan Umum Presiden 2019 di Kabupaten Sidoarjo**

(Lailatul Fitriyah)

**Political Branding Samsul Arifin dalam Pemilihan Kepala Desa Tambakboyo Kecamatan
Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018**

(Muhammad Iqbal Firmansyah)

Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Pati Tahun 2017: Suatu Tinjauan Oligarkisme Parpol

(Achmad Ronggo Prihatmono)

**Dinamika Interaksi Antara Elite Politik Lokal dan Elite Agama dalam Kontestasi
Pemilihan Presiden 2019 di Kota Pasuruan**

(Farid)

Perspektif Political Justice di dalam Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya

(Tamy Nur Nabilah)

PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGATURAN TRANSPORTASI PUBLIK KOTA SURABAYA: STUDI PERKOTAAN PROGRAM “SUROBOYO BUS”

M. Bayu Winaryo¹

¹ Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
bayuwinaryo27@gmail.com

Abstract: *The research focuses on the role of government institutions related to regulating public transportation in the city of Surabaya. Transportation is one sector which influences the economic growth of a city, the potential to be utilized as a commodity used in obtaining sources of power by some parties. Because in the practice of management, how a ruling regime is able to regulate, control and determine the direction of policy that will influence various efforts taken by the government to encourage economic growth from the region so as to be able to "turn on industrial machinery in its territory" and create new economic growth centers. Suroboyo Bus is also a manifestation of ongoing democracy in the city of Surabaya. In this study, we will explain several problems, first discussing the institutions involved in the process of forming a political decision related to the management of Suroboyo Bus, secondly about the interests involved in the political decision, the three relations that will emerge during the process. In this study it is known that the mayor is the institution that most determines the direction of policy that will be taken in the transportation sector in the city of Surabaya.*

Keywords: *Politics of transportation, urban regime theory, public policy, political decisions.*

PENDAHULUAN

Dalam pertumbuhan suatu kota tidak terlepas dari peran pemerintah serta kepentingan-kepentingan pihak terkait yang ikut mempengaruhinya. Dalam pertumbuhan suatu kota, Pemerintah merupakan salah satu pemilik kekuasaan yang pada akhirnya akan membentuk suatu rezim yang mampu mempengaruhi berbagai keputusan politik dan arah kebijakan yang akan diambil oleh pihak Pemerintah Kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan mesin-mesin industri di wilayahnya agar dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang akhirnya mampu memicu perputaran ekonomi yang lebih cepat serta menjadikan pendapatan dari masyarakat semakin meningkat. Suatu rezim ikut mengambil peran dalam mempengaruhi arah kebijakan yang akan diambil melalui sumber-sumber kekuasaan yang mereka miliki. Salah satu indikator yang dapat dilihat terkait dengan pertumbuhan suatu kota adalah dari bagaimana mereka mampu menggerakkan mesin-mesin industri yang ada di wilayahnya sehingga dapat membuka lahan bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi dan mendorong pertumbuhan yang semakin pesat pada wilayahnya. Transportasi merupakan salah satu komoditas baru yang dapat dikelola dalam memperoleh sumber-sumber kekuasaan serta keuntungan dari segi ekonomi sehingga mampu mendatangkan pendapatan serta membuka peluang baru bagi para pemilik modal untuk melakukan investasi.

Pertumbuhan Kendaraan yang mencapai 7,03% setiap tahunnya, menyebabkan berbagai permasalahan di bidang transportasi. Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak mampu lagi diimbangi oleh ketersediaan lebar jalan menyebabkan kemacetan pada sebagian besar jalan di Surabaya. Selain kemacetan, permasalahan lain seperti tingginya polusi yang ditimbulkan serta tingginya angka kecelakaan yang terjadi menimbulkan permasalahan-permasalahan yang harus dapat diselesaikan oleh

pihak pemerintah dibidang transportasi agar tidak semakin berlarut-larut dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru dimasa yang akan datang. Transportasi publik merupakan salah satu alternatif yang diharapkan mampu mengurangi berbagai permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya transportasi publik merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat Surabaya yang sangat tinggi. Namun, pada kenyataannya permasalahan terkait transportasi publik yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surabaya juga belum memadai untuk dijadikan sebagai alternatif tersebut. permasalahan terkait armada, infrastruktur, sarana prasarana, regulasi, dan operasi masih perlu dilakukan berbagai pembenahan diberbagai sektor. Diharapkan solusi ini mampu menarik minat masyarakat untuk mengurangi kemacetan, polusi serta kecelakaan yang sering terjadi pada pengguna kendaraan pribadi. Untuk itu diperlukan kehadiran moda transportasi yang nyaman, aman serta mampu mengakomodir dan menarik minat masyarakat agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal. Berbagai alternatif sudah pernah ingin dihadirkan oleh Pemerintah Kota Surabaya namun pada pelaksanaannya memang mengalami berbagai kendala. Salah satu contohnya adalah kegagalan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadirkan Trem atau MRT yang mana keduanya belum mampu terealisasi hingga saat ini.

Suroboyo Bus sendiri hadir di tengah harapan masyarakat Kota Surabaya yang mengharapkan kehadiran moda transportasi yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan transportasi yang selama ini dihadapi, di tengah kegagalan pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan MRT maupun Trem yang selama ini digadang-gadang mampu menjadi salah satu solusi mengatasi berbagai permasalahan transportasi yang dihadapi Kota Surabaya. Dalam kehadirannya sendiri, selain banyak menimbulkan keuntungan, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan baru yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu masalah yang bisa dilihat dari kehadiran Suroboyo Bus ini adalah tidak didukungnya infrastruktur yang memadai mengingat tidak disediakan jalur khusus bagi bus ini yang mana dengan dimensi bus yang cukup besar bagi sebagian besar jalanan yang ada di kota Surabaya ini yang di awal kehadirannya diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang ada, justru menimbulkan penumpukan kendaraan ketika bus ini lewat pada beberapa titik terutama pada jalan-jalan sempit dan persimpangan, dan hal tersebut sangat terlihat ketika di persimpangan dan posisi bus akan berbelok yang mana membutuhkan waktu yang lumayan lama mengingat ukuran bus yang panjang sehingga terjadi penumpukan kendaraan di belakangnya.. Selain itu tidak adanya untuk halte dari bus ini juga dapat dikatakan belum layak mengingat masih ada beberapa halte yang belum memiliki bangunan fisik yang mana tidak ada tempat duduk serta tempat berteduh bagi calon penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi ini.

Permasalahan lain yang timbul adalah terkait dengan kebijakan pembayaran yang menggunakan sampah botol plastik dan tidak menerima pembayaran menggunakan uang. Kebijakan tersebut bagi sebagian calon penumpang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan moda transportasi ini mengingat mereka harus mengumpulkan sampah botol untuk kemudian disetorkan ke bank sampah yang sudah disediakan dan ditukar menjadi poin yang selanjutnya digunakan untuk membayar atau bahkan mereka harus membawa sampah botol ketika ingin naik bus. Hal tersebut sangat merepotkan bagi

sebagian orang, meskipun di pihak lain ada sebagian masyarakat yang juga lebih senang atas kebijakan tersebut mengingat mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser uang pun untuk bisa menikmati bus ini. Namun, jika dilihat dari latar belakang dihadirkan bus ini yang ingin menarik minat pengguna kendaraan pribadi agar mau beralih ke kendaraan umum yang sebagian besar dapat dilihat adalah kaum pekerja yang membutuhkan moda transportasi yang simple dan tidak ribet maka metode pembayaran ini perlu dikaji ulang agar semua kalangan mampu merasakan manfaat atas hadirnya Suroboyo Bus ini dan meningkatkan aksestabilitas bagi para calon penumpangnya. Kurang Fleksibelnya kebijakan terkait metode pembayaran yang ditentukan oleh pihak Pemerintah selaku pembuat regulasi menyebabkan rendahnya tingkat aksestabilitas pada moda transportasi ini dinilai sangat rendah, yang mana hal tersebut justru membuat tujuan diadakannya suatu moda transportasi menjadi tidak tercapai, dikarenakan dari segi aksestabilitas yang dimiliki masyarakat selaku pengguna nya menjadi sangat rendah. Lalu untuk apa diadakan suatu moda transportasi publik.

Urban Regime Theory (Teori Rezim Perkotaan)

Politik perkotaan erat kaitannya dengan bagaimana suatu kota mampu mengelola kewenangan serta kekuasaan politik yang dimiliki. Hal tersebut berkaitan dengan fragmentasi dari suatu kewenangan yang telah terbangun dan bagaimana suatu kota mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya serta bagaimana suatu pemerintahan dapat berjalan berdasarkan kekuasaan dimiliki, sehingga birokrasi dapat berjalan sesuai fungsinya dalam suatu pemerintahan. Karena teori ini berpendapat bahwa suatu organisasi politik mampu membentuk kontrol populer yang menjadikan pemerintah menjadi kurang responsif atas permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Karena dalam menentukan arah keputusan politik yang diambil dalam suatu pemerintahan tentu tidak akan lepas dari pengaruh dari pemilik kepentingan terkait.

Berbicara mengenai rezim yang terlibat dalam pertumbuhan suatu kota, tidak hanya berkaitan dengan suatu perubahan serta pergeseran dari siapa yang berkuasa melainkan lebih melihat kepada perubahan dan pergeseran dari suatu objek yang dikuasai itu sendiri. Karena disini yang lebih dilihat adalah lahan yang dikelola sebagai suatu komoditas yang dapat digunakan untuk memperoleh sumber kekuasaan serta keuntungan dari segi ekonomi. Karena pada prakteknya apabila suatu kelompok elite digantikan oleh kelompok elite lain ditengah jalan dari suatu proyek pertumbuhan kota itu tadi, kelompok elite baru sebagai penerus/pengganti dari rezim sebelumnya tidak dapat disalahkan dan tidak dapat merubah konsensus atau kesepakatan yang sudah ada sebelumnya. Karena dalam Pertumbuhan suatu kota, Suatu konsensus akan lebih kuat dibandingkan kebijakan yang akan dibuat mengingat bahwa konsensus adalah merupakan salah satu kunci utama dalam pertumbuhan suatu kota.

Pada intinya teori ini menekankan terjadinya suatu kerjasama atau koalisi yang terjalin antara pemerintah sebagai pemilik sumber-sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah dan pemilik modal sebagai elite ekonomi yang membantu dari segi modal. Diharapkan keduanya mampu menjalin suatu kerjasama yang baik agar mampu mengembangkan suatu wilayah. maupun kota menjadi lebih maju. Karena konsensus yang terjalin antara keduanya akan mempengaruhi arah kebijakan yang diambil oleh pihak Pemerintah sebagai pembuat regulasi dalam suatu wilayah perkotaan yang mana akan berdampak

pada pertumbuhan dari suatu wilayah atau kota tersebut dan kesejahteraan suatu masyarakat tergantung pada kepentingan yang dimiliki oleh suatu rezim yang berkuasa, apakah kepentingan tersebut kan menguntungkan atau tidak bagi masyarakat itu sendiri.

Peran yang dimiliki oleh pemerintah sebagai elite yang pemegang kekuasaan dari suatu wilayah akan membentuk suatu rezim yang akan mempengaruhi berbagai upaya yang diambil oleh pihak pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya dan diharapkan mampu menghidupkan mesin-mesin industri yang ada agar tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan memicu perputaran ekonomi yang lebih cepat serta menjadikan pendapatan dari masyarakat semakin meningkat. Karena pertumbuhan suatu kota dapat dilihat dari pergerakan mesin-mesin industri yang ada pada wilayahnya. Terkait transportasi, adalah bagaimana pemerintah mampu memanfaatkan sektor ini sebagai komoditi dalam memperoleh kekuasaan serta keuntungan dalam segi ekonomi serta tetap mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Sehingga dalam pengelolaannya adalah bagaimana suatu rezim yang berkuasa dengan berbagai kepentingan yang dimiliki mempengaruhi arah keputusan politik yang diambil dalam upaya pengelolaan transportasi publik ini.

Lembaga yang Terlibat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Program Suroboyo Bus

Suroboyo Bus hadir sebagai salah satu bagian dari agenda pengembangan dan pembangunan wilayah yang memiliki fokus pada pengadaan sistem transportasi serta infrastruktur layak bagi masyarakat Kota Surabaya sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi serta kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya serta menjalankan amanat UU No. 22 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya program ini tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang menentukan arah keputusan politik yang diambil oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam suatu program, pastilah terdapat tujuan awal yang ingin dicapai oleh pihak inisiator sebagai pencetus ide terkait suatu program, begitu juga dengan Program Suroboyo bus ini.

Pada awal dicetuskannya ide Suroboyo Bus ini hingga proses perencanaan dan penerapan tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang ingin dicapai baik oleh pencetus maupun pengelola serta pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Berkaitan dengan Program Suroboyo Bus ini terdapat lembaga eksekutif dan legislatif yang ikut terlibat dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Lembaga eksekutif sebagai inisiator serta eksekutor atas setiap program yang dilakukan dalam suatu pemerintahan dan legislatif sebagai pihak yang mengawasi dan menyetujui setiap perencanaan program yang sudah dibuat.. Dalam proses penyusunan Kebijakan Program Suroboyo Bus ini, lembaga eksekutif yang terlibat dalam penyusunan Kebijakan Program Suroboyo Bus terdiri Walikota, Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan BAPPEKO Kota Surabaya. Sedangkan lembaga legislatif yang terlibat adalah DPRD Kota Surabaya yang berasal dari Komisi B dan Komisi C.

Dalam Proses penyusunan kebijakan Program Suroboyo Bus, BAPPEKO memiliki peran untuk menyusun Rancangan draf anggaran yang diperlukan dalam Program Suroboyo Bus, yang nantinya draf tersebut menjadi patokan dalam penyusunan anggaran kebijakan Program Suroboyo Bus. Dalam pelaksanaan pengelolaan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Surabaya pada Program Suroboyo Bus

ini secara garis besar akan lebih ke arah teknis dalam pengadaan, pengoperasian dan perawatan dari armada Suroboyo Bus itu sendiri. Selain itu alasan dilibatkannya Dinas Perhubungan adalah karena DISHUB merupakan *stakeholder* yang ada di dalam struktur Pemerintah Kota yang memiliki akses pada anggaran terkait Transportasi yang ada di kota Surabaya ini. Sedangkan untuk Dinas Kebersihan Dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Kota Surabaya berperan dalam pengelolaan sampah plastik yang digunakan dalam pembayaran pengguna moda transportasi ini. Sementara itu peran sebagai inisiator lebih banyak dilakukan oleh Walikota Surabaya selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktural Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan untuk lembaga legislatif sendiri terdiri dari Anggota Komisi B DPRD Surabaya terkait kebijakan retribusi dari Program Suroboyo Bus dan Komisi C DPRD Surabaya yang menangani permasalahan terkait dengan kebijakan moda transportasi. Perkembangannya, karena DPRD memiliki 3 fungsi, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan dalam hal adanya inovasi program Suroboyo Bus ini, DPRD memang memainkan peran sebagaimana fungsinya tersebut. DPRD Kota Surabaya di sini berperan sebagai regulator dalam proses penyusunan Kebijakan Program Suroboyo Bus ini. Yang mana secara teknis tugas dari DPRD kota Surabaya ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu: *Pertama*, menangani terkait dengan kebijakan Retribusi Suroboyo Bus, Tugas ini dimiliki oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya yang ikut menyusun dan mengawasi segala jenis kebijakan retribusi yang akan dilakukan pada Program Suroboyo Bus. *Kedua*, menangani terkait dengan kebijakan Moda Transportasi Suroboyo Bus, Tugas ini dimiliki oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya yang ikut menentukan dan mengawasi moda transportasi yang digunakan pada Program Suroboyo Bus.

DPRD yang memiliki wewenang sebagai regulator pada sistem pemerintahan, berhak memberikan persetujuan maupun penolakan terhadap rancangan program yang diajukan oleh pihak pemerintah. Terlebih apabila tidak dilibatkannya pihak DPRD dalam perencanaan suatu program maka kemungkinan untuk program tersebut dapat disetujui dan terealisasi menjadi sangat kecil mengingat tugas dari DPRD yang berperan sebagai regulator atas kinerja dari pihak eksekutif yang memiliki hak untuk menolak rancangan program yang diajukan oleh lembaga eksekutif. Namun jika melihat jumlah kursi yang dimiliki oleh PDI-perjuangan yang notabene merupakan partai pengusung Walikota selaku lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur Pemerintah Kota Surabaya, justru menjadikan struktur DPRD Kota Surabaya menjadi salah satu sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Walikota dalam merealisasikan setiap program yang lembaga eksekutif rencanakan. Peran lembaga sebagai eksekutif sebagai inisiator akan semakin mudah untuk mendapat persetujuan dari pihak legislatif mengingat adanya sumber kekuasaan yang dimiliki pihak eksekutif dalam hal ini walikota terhadap partai pengusungnya yang memiliki dominasi kursi dalam lembaga legislatif. Dengan kursi yang dimiliki PDI-P dalam struktur DPRD Kota Surabaya sebanyak 15 kursi tersebut sudah cukup mendominasi arah keputusan politik yang akan diambil oleh DPRD Kota Surabaya terutama dalam menyukseskan program-program yang diajukan oleh rekanan partainya, Walikota yang memiliki wewenang sebagai inisiator bagi setiap program yang akan diterapkan di Surabaya.

Di sisi lain, dalam pengelolaan Suroboyo Bus ini, sama sekali tidak melibatkan DAMRI. Hal tersebut mengingat bentuk DAMRI yang saat ini adalah Perusahaan Umum "PERUM" yang

mengharuskan lembaga ini mencari keuntungan untuk perusahaannya. Sedangkan disisi lain, Pemerintah Kota Surabaya menginginkan hadirnya Suroboyo Bus ini lebih mengutamakan pelayanan serta edukasi bagi seluruh masyarakat. Apabila dalam pengelolaannya melibatkan Perum DAMRI, dikhawatirkan keputusan pembayaran 100% menggunakan sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diterapkan sesuai harapan awal perencanaan Program Suroboyo Bus ini. Sehingga pada pelaksanaannya, Suroboyo Bus yang tidak memiliki Badan Hukum yang menaungi layaknya Bus TransJakarta tidak bisa menggunakan plat berwarna kuning meskipun statusnya sebagai transportasi publik atau angkutan umum.

Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya terkait Program Suroboyo Bus

Berkaitan dengan implementasi dari kebijakan Suroboyo Bus ini, dapat menunjukkan bahwa terdapat kepedulian Pemerintah Kota Surabaya di sektor transportasi yang selama ini tidak banyak mendapat perhatian oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya terkait Program Suroboyo Bus, merupakan usaha Pemerintah dalam mengatasi permasalahan transportasi yang selama ini dihadapi terkait kemacetan, polusi serta tingginya angka kecelakaan yang terjadi. Suroboyo Bus hadir sebagai alternatif baru yang hadir di tengah kegagalan Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan Trem maupun MRT yang selama ini digadang-gadang akan segera hadir di Surabaya. Selain itu, Suroboyo Bus diharapkan mampu memberikan solusi serta jaminan dan kepastian menanggapi persoalan-persoalan transportasi yang terjadi ditengah masyarakat. Suroboyo Bus juga diharapkan menjadi wujud demokrasi yang sedang berjalan di Kota Surabaya. Di mana dapat menunjukkan bagaimana peran negara turut serta hadir di tengah-tengah masyarakat sipil, di mana masyarakat juga dapat mempengaruhi negara dalam wujud pembentukan kebijakan-kebijakan yang diterapkan. Hadirnya Suroboyo Bus sebagai jawaban atas permasalahan transportasi yang dihadapi masyarakat Kota Surabaya merupakan wujud dari hadirnya negara terhadap masyarakat yang dipimpin.

Suroboyo Bus yang pada awal diluncurkannya hanya berjumlah 10 unit, yang kemudian pada tanggal 4 Januari 2019 bertempat di taman Surya, menambah jumlah armada sebanyak 10 unit lagi, sehingga secara keseluruhan jumlah Suroboyo Bus sejak tanggal 4 Januari 2019 menjadi 20 unit. Menunjukkan adanya keseriusan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalankan program ini. Penambahan unit ini diketahui juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Surabaya. Selain itu dapat dilihat bahwa Program Suroboyo Bus merupakan bentuk tanggung jawab Pemkot Surabaya menciptakan transportasi yang aman bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya. Program Suroboyo Bus, merupakan usaha dalam memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat pada sektor transportasi massal, dan mampu berpihak pada masyarakat serta memberikan jaminan atau kepastian menanggapi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat ikut mewarnai pemerintahan demokrasi saat ini.

Kebijakan Program Suroboyo Bus menjadi wujud intervensi pemerintah yang dilakukan demi kepentingan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang transportasi. Berdasarkan berbagai temuan di lapangan, secara normatif fokus dari pengadaan Suroboyo Bus ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, Sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah

kemacetan yang terjadi di kota Surabaya. Dalam implementasinya, Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan alternatif moda transportasi baru yang mampu mengakomodir kebutuhan transportasi bagi masyarakat kota Surabaya yang aman, nyaman dan terjangkau. Dengan harapan untuk menarik minat masyarakat kota Surabaya agar mau beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. *Kedua*, Sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat terkait lingkungan hidup serta pengelolaan sampah plastik yang selama ini juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Di sisi lain, dipilihnya metode pembayaran menggunakan sampah botol plastik sebagaimana yang sudah diatur dalam PERWALI No. 67 tahun 2018 tentang Tentang kontribusi sampah dalam penggunaan layanan bus Surabaya. Merupakan inovasi yang belum pernah dilakukan oleh kota lain di Indonesia. Surabaya merupakan satu-satunya kota yang menerapkan metode pembayaran menggunakan sampah botol plastik sebagai alat pembayaran untuk moda transportasi yang disediakan di kotanya. Kebijakan pembayaran yang menggunakan sampah botol plastik dan tidak menerima pembayaran menggunakan uang. Kebijakan tersebut bagi sebagian calon penumpang menjadi alasan bagi mereka untuk tidak menggunakan moda transportasi ini mengingat mereka harus mengumpulkan sampah botol untuk kemudian disetorkan ke bank sampah yang sudah disediakan dan ditukar menjadi poin yang selanjutnya digunakan untuk membayar atau bahkan mereka harus membawa sampah botol ketika ingin naik bus. Hal tersebut sangat merepotkan bagi sebagian orang, meskipun di pihak lain ada sebagian masyarakat yang juga lebih senang atas kebijakan tersebut mengingat mereka tidak perlu mengeluarkan sepeser uang pun untuk bisa menikmati bus ini. Namun, jika dilihat dari latar belakang dihadirkan bus ini yang ingin menarik minat pengguna kendaraan pribadi agar mau beralih ke kendaraan umum yang sebagian besar dapat dilihat adalah kaum pekerja yang membutuhkan moda transportasi yang simpel dan tidak ribet maka metode pembayaran ini perlu dikaji ulang agar semua kalangan mampu merasakan manfaat atas hadirnya Suroboyo Bus ini dan meningkatkan aksestabilitas bagi para calon penumpangnya. Kurang fleksibelnya kebijakan terkait metode pembayaran yang ditentukan oleh pihak pemerintah selaku pembuat regulasi menyebabkan rendahnya tingkat aksestabilitas pada moda transportasi ini dinilai sangat rendah, yang mana hal tersebut justru membuat tujuan diadakannya suatu moda transportasi menjadi tidak tercapai, dikarenakan dari segi aksestabilitas yang dimiliki masyarakat selaku penggunanya menjadi sangat rendah. Lalu untuk apa diadakan suatu moda transportasi publik.

Di sisi lain, dalam pengelolaan Suroboyo Bus ini, sama sekali tidak melibatkan DAMRI. Hal tersebut mengingat bentuk DAMRI yang saat ini adalah Perusahaan Umum "PERUM" yang mengharuskan lembaga ini mencari keuntungan untuk perusahaannya. Sedangkan disisi lain, Pemerintah Kota Surabaya menginginkan hadirnya Suroboyo Bus ini lebih mengutamakan pelayanan serta edukasi bagi seluruh masyarakat. Apabila dalam pengelolaannya melibatkan Perum DAMRI, dikhawatirkan keputusan pembayaran 100% menggunakan sampah botol plastik tidak bisa sepenuhnya diterapkan sesuai harapan awal perencanaan Program Suroboyo Bus ini. Terkait dengan pengelolaan Suroboyo Bus ada baiknya jika dibentuk suatu badan Khusus yang menangani. Mengingat kota lain di Indonesia sudah memiliki badan tersebut. Untuk menarik investor agar mau berinvestasi pada bidang

transportasi. badan berupa BUMD akan lebih tepat dipilih mengingat badan ini juga masih tetap menekankan pada *public service oriented* sehingga masyarakat juga masih bisa mendapatkan pelayanan yang baik namun tidak menghalangi pula niat bagi para pemilik modal untuk berinvestasi.

SIMPULAN

Program Suroboyo Bus merupakan bentuk konsensus yang berhasil dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang ada di Kota Surabaya. Pada Program Suroboyo lembaga eksekutif yang terlibat adalah Walikota, Bappeko, Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bagian Kepala Unit Suroboyo Bus, Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Sedangkan untuk lembaga legislatif yang terlibat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dari Komisi B dan C. Walikota berperan sebagai inisiator pada program ini yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh BAPPEKO sebagai penyusun Rancangan Anggaran yang akan digunakan serta DISHUB sebagai dinas yang berwenang pada bidang ini. DKRTH sendiri dilibatkan dalam upaya menangani sampah yang dikelola sebagai alat pembayaran bagi penumpang Suroboyo Bus. Sedangkan untuk lembaga legislatif terbagi menjadi 2 yaitu : 1. Komisi B DPRD Kota Surabaya yang bertanggung jawab menangani kebijakan terkait Retribusi Suroboyo Bus. Tugas Komisi B adalah ikut menyusun dan mengawasi segala jenis kebijakan retribusi yang akan dilakukan pada Program Suroboyo Bus. Untuk Komisi C bertugas menangani kebijakan terkait Moda Transportasi Suroboyo Bus, Tugas Komisi C DPRD Kota Surabaya adalah ikut menentukan dan mengawasi moda transportasi yang digunakan pada Program Suroboyo Bus.

Dalam pelaksanaan Program Suroboyo Bus ini dapat dikatakan sudah terjalin kesepakatan dan keduanya setuju untuk menjalankan Program ini. Atas terlaksananya program ini, membuktikan bahwa telah terjadi sebuah konsensus dalam proses perencanaan yang melibatkan Pemerintah Kota Surabaya sebagai lembaga eksekutif dan DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga legislatif. Pada prosesnya lembaga eksekutif yang memiliki peran sebagai inisiator sudah mendapatkan persetujuan atas rancangan yang diajukan pada pihak eksekutif. Berdasarkan temuan di lapangan, Pemerintah Kota Surabaya mampu membentuk suatu rezim yang terintegrasi di bawah kekuasaan yang dimiliki oleh Walikota Surabaya dalam menggerakkan mesin-mesin industri pada bidang Transportasi di Kota Surabaya yang secara garis besar bertujuan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat Kota Surabaya serta menjalankan perputaran ekonomi yang ada di Kota Surabaya melalui pelayanan transportasi yang layak dan memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah S (2016) Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksestabilitas Masyarakat. Surabaya: Airlangga University Press. (Bibliography)
- Dunn NW (2000) Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi II. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. (Bibliography)
- Mazmanian DA & Paul AS (1983) Implementation and Public Policy. Scott Foresman and Company, USA. (Bibliography)
- Samodra W (1994) Kebijakan Publik Proses dan Analisis. Jakarta: Intermedia. (Bibliography)
- Surbakti R (1992) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana. (Bibliography)

- Warjio (2016) Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. (Bibliography)
- Suzanne K (1995) Penguasa dan Kelompok Elite: Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. (Bibliography)

KONSOLIDASI GERAKAN MILENIAL INDONESIA DALAM UPAYA MEMENANGKAN PASANGAN PRABOWO – SANDIAGA UNO DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 DI KABUPATEN SIDOARJO

Lailatul Fitriyah¹

¹*Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
lailatulfitriyah571@gmail.com*

Abstract: *This study aimed to determine the tendencies carried out by GMI Sidoarjo in the 2019 presidential election. GMI Sidoarjo is one of the community organizations that acts as a successful team winning the pair of candidates in the 2019 presidential election. This research is descriptive qualitative by using the theory of political participation from Samuel Huntington and Nelson. From the results of the study obtained several results, namely political participation carried out are collective, organized, legal and ineffective. Consolidation is done internally and externally. Then, the form of political participation in conducting elections is carried out with political discussion, outreach, campaigning and vote escort. The winning effort was unsuccessful, so the pair supported by the Indonesian Millennial Movement in Sidoarjo was defeated due to the lack of targeted support in fighting for votes in the 2019 presidential election.*

Keywords: *Political participation, millennial generation, political consolidation.*

PENDAHULUAN

Generasi muda dengan tahun kelahiran 1980 sampai dengan 2000-an dapat disebut sebagai generasi milenial. Generasi ini memiliki kemampuan yang lebih dari generasi sebelumnya, terutama dibidang komunikasi. Generasi milenial berkomunikasi tanpa bertatap muka secara langsung, dan bisa melakukan komunikasi melalui aplikasi secara daring (online). Melalui kemajuan teknologi yang jauh lebih modern dari masa sebelumnya, pergaulan milenial memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Keikutsertaan milenial dalam berpartisipasi politik menjadi hal penting yang harus diperhatikan, hal ini dikarenakan sikap apatis milenial terhadap politik menjadikannya bersifat apolitis terhadap jalannya politik pada saat ini. Kecenderungan milenial bersifat apolitis dibuktikan oleh Hasanudin Ali (2018), di mana 70% milenial cenderung apatis pada hal-hal yang bersifat politik. Milenial cenderung menyukai pemberitaan gaya hidup, musik, IT dan menonton film. kaum milenial cenderung menganggap politik hanya untuk mereka generasi tua. Mereka juga tidak peduli terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini dan enggan untuk menjadi bagian didalamnya. Berikut yang menyebabkan milenial apolitis menurut Efriza dan Yoyoh Rohaniah (2015): (1) Tingkat ketidakpercayaan yang rendah. para pelaku politik di Indonesia sangat berambisi terhadap posisi tertentu, beberapa tindakan menjatuhkan lawan dan politik uang memperlihatkan watak politisi yang sebenarnya; (2) Kecewa, beberapa orang mungkin beranggapan bahwa semua janji yang diberikan oleh politisi akan dilaksanakan setelah mereka terpilih, namun kenyataannya banyak sekali politisi yang melupakan janji saat masa kampanye hal inilah yang menimbulkan kekecewaan; (3) Buruknya citra partai politik. Banyaknya pemberitaan tentang kasus para politikus yang terjerat korupsi, kolusi dan

nepotisme telah mengakar sejak dahulu dan tidak bisa dipungkiri lagi hal tersebut semakin memperburuk citra partai; dan (4) Banyaknya kasus politisi yang belum selesai. Terlalu banyaknya berita di media massa tentang politisi bermasalah secara berkelanjutan membuat masyarakat heboh karena beritanya tak kunjung usai hingga membuat publik bosan.

Berdasarkan pada keprihatinan keadaan ini, munculah sebuah organisasi masyarakat yang bernama Gerakan Milenial Indonesia (GMI). Organisasi ini berdiri pada 1 Oktober 2018 dan bentuknya adalah komunitas yang menjadi wadah bagi anak muda untuk memanfaatkan potensi pada diri mereka dengan menyampaikan keluh kesah menjalani kehidupan dengan mendiskusikan penyelesaiannya. Dengan tujuan membuat perubahan kepada generasi muda zaman sekarang yang cenderung apatis untuk sadar dan melakukan perubahan dimulai dari diri sendiri. Organisasi ini tidak hanya sekedar sekelompok milenial yang menginginkan perubahan dalam memperbaiki kehidupan mereka saja, tetapi memiliki keinginan untuk mendorong milenial agar aktif berpolitik dan mempersuasi milenial lain. Sehingga milenial mampu berfikir kritis terhadap apa yang terjadi dengan bergabung dan mendukung agar tidak menjadi *swing voters*. Dijelaskan oleh Surbakti (1992) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara untuk mempengaruhi dan ikut mempengaruhi segala proses politik yang terjadi.

Pada momen pemilihan umum presiden 2019 ini, GMI memanfaatkannya dengan mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Hal tersebut dilakukan dengan berpartisipasi secara aktif menjadi pendukung dan berusaha mengumpulkan lebih banyak massa untuk menjatuhkan pilihan pada paslon 02. Selain menginginkan perubahan dalam hal keadilan dan kemakmuran, GMI juga berusaha mengingatkan para elite penguasa dengan caranya sendiri yakni melalui penolakan terhadap hal-hal yang merugikan milenial. Organisasi ini akhirnya menjadi wadah bagi milenial yang menginginkan perubahan dengan memperluas diskusi politik.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan organisasi GMI yang ikut berpartisipasi pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di kabupaten Sidoarjo dan mengetahui bagaimana konsolidasi politik yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan subjek penelitian meliputi empat orang yang memiliki kedudukan penting di GMI Sidoarjo dan Jakarta. Adapun analisis dilakukan dengan mengelompokkan data sehingga rumusan masalah dapat terjawab. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai partisipasi politik milenial. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Arnadi (2012) yang menghasilkan kesimpulan bahwa faktor pembentukan sikap apatisisme mahasiswa di Universitas Lampung pada mahasiswa Ilmu politik dipengaruhi oleh keterlibatan mereka dalam sebuah partai atau organisasi politik tidak membuahkan hasil yang nyata bagi kehidupan mereka sehingga mereka enggan untuk kembali bergabung dalam organisasi politik. Pada penelitian kedua yang dilakukan oleh Aulia (2014) menyebutkan bahwa keadaan pemilih pemula dalam melaksanakan partisipasi politiknya mendapatkan beberapa kendala diantaranya karena mereka tidak mendapatkan pendidikan politik oleh partai politik karena desa Karang Sari, Banyumas sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan kurangnya kesadaran politik para pemilih pemula yang ditunjukkan oleh sedikitnya milenial yang datang pada pemungutan suara pada pilpres 2014. Pada penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ahmad Asroni, et al

(2013) menyatakan pada organisasi Islam sayap partai Golkar melakukan kegiatan melalui dakwah Islam dalam menjaga kerukunan simpatisan dan kader. Dan pada penelitian keempat yang dilakukan oleh Retnayu Prasetyanti (2017) tentang generasi milenial dan inovasi jejaring demokrasi teman Ahok dilakukan dengan mengembangkan media sosial untuk pengawasan pergerakan dalam melakukan dukungan. Keempat hasil penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya : (1) Subyek pada penelitian pertama merupakan milenial yang paham betul tentang keadaan politik tetapi enggan untuk menjadi bagian dari organisasi politik; (2) Subjek pada penelitian kedua adalah tentang kendala pemilih pemula yang tidak mendapat pendidikan politik dalam menghadapi pemilu yang menyebabkan susah terwujudnya partisipasi politik milenial; dan (3) Pada penelitian ketiga dan keempat menyebutkan kedua subjek adalah sama yaitu milenial, tetapi dalam menerapkan strategi pemenangan memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini peneliti memilih subjek generasi milenial yang apatis untuk diajak bergabung menjadi bagian organisasi. Kemudian diberikan pendidikan politik secara intens untuk memahami kepentingan organisasi dan pasangan calon 02 yang mereka dukung dengan mengajak berpartisipasi aktif mulai dari menjadi anggota, menyusun strategi, memilih hingga mengawasi jalannya pemilu. Gerakan Milenial di Sidoarjo mengkonsolidasikan dirinya melalui internal dan eksternal, tidak hanya melalui jejaring media massa.

KERANGKA TEORITIK

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan dari warga negara yang bertindak sebagai individu-individu, yang memiliki maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, dilakukan secara damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Secara umum, partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk yang turut serta dan aktif dalam pelaksanaan politik, seperti memilih seorang pemimpin negara secara langsung, dan turun untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Huntington & Nelson, 1994). Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota dari kelompok kepentingan, menjadi anggota sebuah partai, menjadi relawan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan lain sebagainya. Adanya partisipasi politik menyebabkan kapasitas individu semakin berkembang dalam mengubah nasibnya sendiri. Di negara yang demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik berdasarkan pada kedaulatan yang ada di tangan rakyat yang pada pelaksanaannya melalui kegiatan pemilu. Dijelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, yaitu: *Organization activity*, *contacting*, *lobbying*, *electroral activity*, dan *violence* merupakan bentuk partisipasi politik untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai kategori tersendiri.

Dalam konteks *organization activity*, pada dasarnya setiap warga negara memiliki kebebasan dalam berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini meliputi partisipasi dari

individu ke dalam organisasi, baik menjadi anggota ataupun sebagai pemimpin yang berguna untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks *contacting*, meliputi upaya kelompok atau individu yang berusaha membangun jaringan dengan menghubungi pejabat daerah pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka. Hal tersebut dilakukan karena pejabat memiliki akses kekuasaan yang bisa dimanfaatkan untuk ikut serta mendukung pergerakan sebuah organisasi politik dan mendatangkan manfaat bagi mereka.

Dalam konteks *Lobbying*, meliputi upaya dari sekelompok orang atau individu untuk menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi setiap keputusan yang mereka tentang meliputi suatu isu-isu politik. Melobi biasanya dilakukan agar seorang pimpinan politik mampu meyakini adanya suatu isu tentu ada cara penyelesaiannya.

Dalam konteks *Electroral activity*, kegiatan ini biasa dilakukan dari awal menjadi bagian dari anggota organisasi politik kemudian mempersuasi orang lain untuk bergabung, mencari dukungan, melakukan kampanye, mengambil sikap memilih, mencari dana kampanye, memberikan suara dan yang terakhir mengawasi jalannya pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah aspek penting dalam negara demokrasi, terutama saat menggunakan pendekatan *behavioral* (perilaku) dan *post-behavioral* (pasca tingkah laku). Partisipasi politik banyak dilakukan di negara-negara berkembang karena pasrtisipasi politiknya masih pada tahap pertumbuhan. Perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya diantaranya sebagai berikut : (1) Menduduki sebuah jabatan politik dan administrasi; (2) mencari jabatan politik dan administrasi; (3) Mencari beberapa anggota aktif dalam sebuah organisasi politik; (4) Menjadi anggota pasif dalam sebuah kelompok atau organisasi politik; (5) Menjadi anggota aktif dalam sebuah kelompok atau organisasi semi politik; (6) Menjadi anggota pasif dalam suatu kelompok atau organisasi semi politik; (7) Partisipasi dalam demonstrasi; (8) Partisipasi pada sebuah diskusi politik internal; dan (9) Partisipasi pada Pemilihan Umum. Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya dikategorikan menjadi dua yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif (Surbakti, 1992).

Berdasarkan defisini dan penjelasannya, adanya aktivitas partisipasi politik termanifestasikan kedalam kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang dilakukan secara nyata oleh masyarakat biasa. Anggota masyarakat memiliki keinginan untuk turut serta mengambil andil dalam partisipasi politik karena segala keputusan yang diambil oleh pemerintah ini bersifat mengikat. Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa setiap keputusan pasti ada dampaknya, dampak inilah yang disebut dengan *political efficacy* (Budiarjo, 2008).

Untuk membedakan apakah sebuah aktivitas meliputi partisipasi politik atau tidak Huntington dan Nelson serta Ramlan Surbakti memberikan batasan untuk menggunakan konsep partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, konsep partisipasi politik tentu memiliki beberapa aspek pada definisi ini: Pertama, partisipasi politik mencakup kegiatan-kegiatan perilaku politik yang dilakukan secara nyata tidak meliputi sikap-sikap. Kedua, yang menjadi perhatian adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman. Ketiga, berfokus kepada kegiatan-kegiatan pokok saja yang menjadi pusat perhatian untuk mempengaruhi pemerintah. Keempat, mencakup seluruh kegiatan dengan makasud

untuk mempengaruhi pemerintah. Kelima, mencakup kegiatan orang lain diluar pelaku partisipasi yang bermaksud mempengaruhi segala bentuk keputusan yang diambil pemerintah biasa disebut sebagai partisipasi politik yang di mobilisasikan.

Kebalikan dari adanya partisipasi politik adalah apatis. Di samping masyarakat yang aktif dalam suatu bentuk partisipasi atau lebih tentu ada sekelompok masyarakat yang tidak melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik dan tidak peduli dengan permasalahan negara. Sikap apatis inilah yang menjadi perhatian khusus oleh para ilmuwan terdahulu karena sikap acuh tak memberi fleksibilitas kepada sistem politik, berbanding terbalik dengan warga negara yang selalu aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik Gerakan Milenial Indonesia di Sidoarjo

Gerakan Millennial Indonesia (GMI) merupakan sebuah organisasi politik yang berdiri atas dasar kerisauan terhadap kaum milenial yang masih saja apatis terhadap proses politik bisa dilihat dari pemilihan umum presiden, masih ada yang golput karena tidak percaya terhadap kredibilitas pemimpin menjadi faktor utama maraknya golput di Indonesia. Pemilih yang berasal dari generasi milenial nilainya mencapai 40% sampai dengan 45% pada Pemilu 2019. Tetapi dari hasil tersebut jumlahnya lebih banyak milenial yang apatis terhadap politik. hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin Ali, *founder* sekaligus CEO Alvara Research Center (Hasanudin, 2018). Banyaknya organisasi politik muncul dengan membawa pengaruh pada masing permasalahan untuk dicari jalan penyelesaiannya. GMI hadir untuk meminimalisir kelompok milenial yang berperan sebagai *swing voters* untuk diberikan arahan agar mereka mampu menentukan siapa sosok yang pantas memimpin negara ini. Sebagai organisasi baru, GMI hadir sebagai wadah untuk milenial berkumpul agar mampu menganalisis setiap pergerakan aktifitas politik di Indonesia. Dalam perjalanannya GMI Sidoarjo sama saja dengan GMI pusat yang dimulai dengan diskusi ringan mengenai situasi politik yang sedang terjadi saat ini. Banyaknya anggota yang bergabung memperlihatkan kemampuan organisasi ini dalam memepersuasi milenial. Organisasi GMI Sidoarjo memang belum cukup diketahui oleh masyarakat oleh sebab itu dilakukan upaya konsolidasi politik untuk membentuk tim yang solid untuk mendukung paslon 02 yang dilakukan secara internal dan eksternal.

Sebagai sebuah organisasi politik, GMI Sidoarjo memiliki visi yakni “Milenial itu Cerdas Konstitusional Bukan Emosional” dan misi organisasi yakni “Memenangkan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019”. Adapun struktur organisasi dijabarkan pada struktur berikut



Gambar 1. Struktur Organisasi GMI Sidoarjo

Sumber: Dokumen Sekretaris GMI Sidoarjo tentang struktur organisasi GMI Sidoarjo

GMI Sidoarjo ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan politik secara santai dengan cara diskusi politik ringan yang membahas seputar pemilu presiden 2019 yang akan digelar serentak dengan Pileg. GMI Sidoarjo berharap dengan adanya diskusi politik dan berbagai kampanye politik secara terbuka ini nantinya membuat masyarakat dan khususnya generasi milenial sadar betul bahwa turut menyalurkan hak suara itu sangat penting, menyangkut nasib kehidupan mereka lima tahun mendatang dalam menentukan sosok pemimpin. Pada organisasi ini juga mengadakan diskusi tentang pentingnya politik sehat dengan tidak terlibat dalam aksi saling menjatuhkan antar lawan, tapi beradu argumen secara positif dengan melihat data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Konsolidasi Internal GMI Sidoarjo

Konsolidasi internal dapat dimaknai sebagai upaya penguatan yang dilakukan didalam organisasi. Biasanya konsolidasi ini dilakukan dengan membentuk strategi untuk menciptakan tim yang solid. Berikut beberapa cara yang dilakukan GMI yakni:

1. Mengadakan pertemuan rutin

GMI Sidoarjo melakukan konsolidasi secara internal dimulai dengan upaya penguatan organisasi secara menyeluruh, mulai dari pengurus inti hingga anggota. Seluruh anggota yang bergabung dalam GMI harus memiliki kesamaan visi dan misi yaitu memenangkan Prabowo-Sandiaga Uno dengan tujuan Adil dan makmur. Berikut merupakan langkah GMI Sidoarjo melakukan konsolidasi internal melalui pertemuan rutinnnya :

- a. Mengundang seluruh anggota dan pengurus inti untuk silaturahmi dan diskusi ringan,
- b. Mengadakan *event* untuk milenial dengan sharing dengan pendiri GMI;
- c. Berdiskusi baik secara *online* dan bertatap muka (daring)
- d. Menjadwalkan waktu untuk aktif berdiskusi dan menyusun agenda serta strategi pendekatan untuk turun sosialisasi ke masyarakat.

Konsolidasi internal dibutuhkan kerja nyata dari seluruh anggota organisasi untuk memperkuat organisasi. Sebagai wadah bagi kaum Millennial GMI Sidoarjo harus mampu menunjukkan perkembangan untuk memperkuat organisasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengelola semua potensi yang ada pada diri setiap anggota. Dengan meningkatkan peranan organisasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebagai organisasi pendukung parpol semata.

2. Menyusun strategi pemenangan di lapangan, Strategi merupakan bagian dari perencanaan untuk menyukseskan tujuan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan. Berbagai proses atau rangkaian kegiatan untuk mengambil sebuah keputusan yang bersifat menyeluruh beserta pelaksanaannya. Pembuatan strategi harus berasal dari pimpinan organisasi yang berkoordinasi dengan anggota dan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan sama. Berdasarkan wawancara diatas terlihat jelas bahwa strategi merupakan sebuah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara bersama secara menyeluruh. kemudian segala keputusan organisasi harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang pelaksanaannya terarah. Dalam hal ini GMI menggunakan dua strategi untuk pemenangan yaitu *push marketing* dan *pass marketing*.

Konsolidasi Eksternal GMI Sidoarjo

Konsolidasi Eksternal dapat dimaknai sebagai upaya penguatan yang dilakukan diluar lingkup organisasi. Berikut adalah cara GMI melakukan konsolidasi secara eksternal:

1. Menjangkau pemilih.
GMI Sidoarjo memiliki tujuan untuk memperkenalkan organisasi mereka, serta mensosialisasikan pasangan calon yang meeka dukung. Karena masyarakat sebagai pemilih berhak mengetahui sosok figure yang nanti akan mereka beri kepercayaan, maka adanya kunjungan ke pelosok kota Sidoarjo ini diharapkan memperkuat suara yang nanti didapatkan.
2. Mendatangi tokoh masyarakat berpengaruh.
Adanya aktivitas mencari dukugan kepada masyarakat dengan cara sosialisasi dan kampanye tentu akan efektif untuk menggalang dukungan guna memperoleh suara. GMI Sidoarjo juga menampung keluhan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Organisasi ini emdatangi sejumlah tokoh desa berpengaruh yang disegani oleh masyarakat sekitar. Seperti sesepuh di desa, ketua RW dan RT di beberapa wilayah.
3. Merawat basis suara
Banyaknya jumlah suara yang diharapkan oleh GMI Sidoarjo untuk memenangkan paslon 02 membuat organisasi ini memilih untuk merawat basis suara. Dimana pada tahun 2014 lalu Prabowo hanya mampu memenangkan 3 Kecamatan yakni Tarik, Buduran dan Jabon. Dengan mempertahankan suara yang didapatkan, GMI yakin wilayah tersebut akan menjadi daerah pemenangannya lagi.
4. Memperkuat kampanye secara *door to door*
Pendekatan kepada masyarakat juga dilakukan dengan kampanye secara *door to door*. Dimana kampanye dengan cara mendatangi pintu ke pintu dinilai lebih efektif dibandingkan dengan

kampanye melalui pemasangan baliho. Karena dengan adanya kampanye ini masyarakat lebih nyaman karena bisa mengenal calon yang didukung lebih intens tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Karena GMI Sidoarjo yakin kampanye ini akan membuat pemilih yang belum punya pilihan jika dilakukan pendekatan akan tertarik mengikuti pilihan mereka, dan jika sudah punya pilihan bisa dilakukan persuasi sehingga mengubah calon yang nantinya akan dipilih.

5. Mendatangkan *influencer*

Aktivitas organisasi GMI yang menonjol sebagai bukti eksistensinya dikalangan masyarakat dibuktikan dengan mereka mengumpulkan massa pada kampanye akbar banyak dari kalangan masyarakat yang sadar akan sosialisasi yang telah diadakan sehingga mereka berkumpul. Dalam hal ini dapat terlihat dari banyaknya dukungan sebanyak 70.000 oleh masyarakat di Sidoarjo dan sekitarnya. Acara ini diagendakan oleh partai Gerindra bersama GMI Sidoarjo sebagai wujud dari rasa syukur akan dukungan yang mengalir dari masyarakat Sidoarjo. Acara ini diadakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dalam kampanye akbar ini dihadiri sejumlah musisi dan politisi. Diantaranya Rhoma Irama, Nisa Sabyan, Al Ghazali, Ketua DPR Marzuki Ali, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Gus Irvan Yusuf, Cucu pendiri Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Gus Zulfikar, serta Ketua Umum DPP PAN Zukifli Hasan. Para musisi tanah air ini datang dengan undangan partai dan undangan dari anggota GMI yang memiliki koneksi dengan sejumlah penyanyi tersebut. Hal ini membuktikan Konsolidasi internal dan eksternal GMI Sidoarjo sudah cukup baik untuk membentuk solidaritas politik. Adanya aktivitas seperti ini dalam konteks politik Indonesia menjadi tahap baru dalam demokrasi.

6. Mengamankan suara yang diperoleh

Dalam mengawal jalannya pilpres 2019 ini GMI melakukan pengawalan dan pengawasan pada saat pemungutan dan perhitungan suara. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan terhadap suara yang berhasil terkumpul. Dilihat dari kegiatan organisasi ini cenderung memiliki kekhawatiran terhadap hilangnya suara untuk paslon 02. GMI terus mengawal pada setiap kecamatan terutama pada daerah yang dianggap sebagai basis suara. Adanya partisipasi untuk mengawal jalannya Pemilu merupakan wujud nyata dari adanya revolusi mental rakyat yang sangat penting bagi berjalannya sistem demokrasi.

Berdasarkan konsep konsolidasi politik, (Schmitter, 1993) menyebutkan bahwa konsolidasi merupakan sebuah proses penggabungan beberapa elemen politik untuk bekerjasama dan saling memfasilitasi proses politik yang berlangsung. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi meliputi institusi politik atau lembaga politik, baik itu partai politik ataupun bukan, elite politik, kelompok kepentingan ataupun warga negara biasa. Konsolidasi politik menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh organisasi politik karena dengan melakukan konsolidasi maka akan mendapat kesepakatan bersama yang berisi tentang nilai politik. Dengan adanya konsolidasi politik akan mempertemukan elemen politik yang berbeda untuk saling mendukung dan memfasilitasi sebagai jalan untuk memperkuat organisasi politik.

Di sisi lain Giovanni (Sartori, 1997) menyebutkan bahwa pluralisme politik dapat diidentifikasi melalui *diversification of power* yaitu waktu dimana distribusi kekuasaan politik menyebar pada sebuah kelompok-kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat dengan adanya kelompok kepentingan maka masyarakat dapat memetakan isu-isu dan dinamika politik yang terjadi kedalam bentuk kepentingan yang saling berkonsesus bahkan pada akhirnya akan saling toleransi dengan tujuan yang sama yakni kehidupan yang seimbang.

Berikutnya adalah proses politik, yang mengacu pada proses di mana segala aturan dan prosedur sebagai warga negara diterapkan oleh lembaga-lembaga politik. Berpedoman pada Huntington, menyebutkan bahwa proses politik yang memiliki hubungan dengan institusionalisasi politik tentu berisi tuntutan serta dukungan politik dari masyarakat sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (Huntington & Nelson, 1994)

Berdasarkan dari sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, pada umumnya menjelaskan bahwa partisipasi politik merupakan wujud dari kebebasan setiap individu yang melibatkan hati nurani untuk menentukan sosok pemimpin yang mereka sukai. Bentuk-bentuk partisipasi politik diantaranya *Organization activity, Contacting; Lobbying; dan Electoral activity* dilakukan GMI Sidoarjo sebagai wujud dari keikutsertaan mereka dalam proses politik yang ada. Berbagai definisi partisipasi politik diatas dapat terwujud apabila GMI Sidoarjo melakukan upaya konsolidasi dengan pimpinan politik yang lain dengan memanfaatkan segala bentuk kekuasaan untuk memberikan sumbangsinya kedalam pergerakan pemenangan yang dilakukan GMI Sidoarjo untuk paslon 02. Dalam kaitanya dengan kelompok kepentingan, GMI Sidoarjo hadir sebagai wujud dari masyarakat yang menuntut keadilan akan permasalahan politik yang muncul karena kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sesuai dengan kehidupan mereka. Dimana mereka merasa tidak adil karena susah mencari pekerjaan, tidak terjaminnya kesehatan dan mahalnya bahan pokok. Oleh sebab itu, adanya pemimpin pada sentral organisasi politik sangat berpengaruh dalam melakukan upaya konsolidasi dan partisipasi politik baik dalam menyusun strategi hingga pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pemenangan.

SIMPULAN

Generasi milenial menjadi apatis disebabkan oleh beberapa hal di antaranya: (1) Tingkat ketidakpercayaan yang rendah. (2) Kecewa, (3) Buruknya citra partai politik, (4) Banyaknya kasus politisi yang belum selesai. Sehingga muncul GMI sebagai organisasi politik yang menjadi wadah untuk memahami politik beserta kondisinya saat ini. GMI memanfaatkan momen pemilu untuk memberikan dukungannya kepada Prabowo-Sandiaga Uno. Alasan mereka memberikan dukungan adalah didasari dari pendiri GMI pusat yang sudah berafiliasi pada Prabowo sejak pemilu 2014. Kemudian memutuskan membuat pergerakan untuk mendukung paslon 02 dengan mengajak milenial melalui organisasi yang ada. Karena angka partisipasi milenial saat ini masih rendah, maka GMI berusaha mempengaruhi generasi milenial untuk berpartisipasi politik dan menjatuhkan pilihannya pada Prabowo-Sandi di Pemilu 2019.

Konsolidasi politik terjadi karena adanya kesepakatan dengan nilai-nilai politik yang bisa mendekatkan dan mempertemukan elemen-elemen politik menjadi kekuatan yang melebur menjadi satu tujuan. Contohnya : organisasi politik, partai politik dan massa. GMI Sidoarjo memiliki beberapa cara untuk melakukan konsolidasi yakni secara internal dan eksternal. Ada beberapa cara untuk mengkonsolidasikan organisasi secara internal . Pertama, melakukan pertemuan secara rutin dengan seluruh anggota . Pertemuan organisasi GMI rutin diadakan setiap akhir pekan, dimana pada pertemuan tersebut akan ada diskusi politik ringan. Kedua, menyusun strategi kampanye. Dan beberapa partisipasi politik yang dilakukan GMI Sidoarjo membuktikan peranan nyata mereka dalam mengumpulkan massa untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Akan tetapi ketua GMI Sidoarjo tidak dapat mengkonsolidasikan kelompoknya dengan baik. Terbukti dari banyaknya followers *instagram* yang bergabung hanya beberapa saja yang hadir di kegiatan organisasi. Kemudian pada strategi yang dipilih untuk pemenangan tidak efektif sehingga menyebabkan pasangan Prabowo-Sandi kalah pada Pemilu presiden tahun 2019 di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali H (2017) *Milennial Nusantara*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiardjo M (2008) *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Diamond L (2003) *Developing Democracy toward Consolidation* (Alih bahasa Tim Institute for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta: IRE Press. (Bibliography)
- Guillermo O & Phillipe CS (1993) *Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta: LP3ES. (Bibliography)
- Huntington SP & Nelson J (1994) *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursal A (2004) *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Bibliography)
- Ornstein NJ & Elder S (1978) *Interest Group, Lobbying and Policy Making*. Congressional Quarterly Press. (Bibliography)
- Rohaniah Y & Efriza (2015) *Pengantar Ilmu Politik, Kajian Mendasar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publisng.
- Sartori G (1997) *Understanding pluralism*. *Journal of Democracy*, 8(4), 58-69.
- Surbakti R (1992) *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

POLITICAL BRANDING SAMSUL ARIFIN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

Muhammad Iqbal Firmansyah¹

¹ *Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
iqbalfirmansyah26@gmail.com*

Abstract: *This research describes about political branding and political branding communication strategies of Samsul Arifin in Headman election of Tambakboyo in 2018. Samsul Arifin is youngest headman candidate in Sukoharjo who won the headman election in 2018 against incumbent who had two periods of leadership. This study uses descriptive qualitative method with in-depth interviews data collection techniques with Samsul Arifin and the Samsul team coordinator then it was analyzed by using Lorann Downer's theory of political branding strategies. The results are Samsul has brand himself as a young man who will build the village government that has been damaged in the previous period. Samsul delivered his political brand by collaborating with the RT in appointing Samsul as a headman candidate, the youths are conditioning their parents, socializing in the RT forum, asking for blessing to the residents of hamlet (sub village) I, speech during registration of candidate, forming a Samsul's wings team, anticipating of vote buying which usually do in early morning, using banner and making t-shirts for voters who are in Samsul's side. The political brand must be implemented according to the concept, so it is not damaging candidate's brand.*

Keywords: *Political brand, headman election, village government, headman candidate.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan daerah otonomi terendah yang terletak dan dibentuk oleh Kabupaten/Kota di Indonesia yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sehingga lebih efektif dan efisien untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, nasionalisme, dan memajukan perekonomian desa sebagaimana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 4 Huruf a – i. Desa dikelola oleh kepala desa yang bertanggung jawab secara formal untuk urusan infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain yang ada di desa (Kartohadikoesoemo, 1984). Secara umum fungsi dari kepala desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 1 – 4. Artinya bahwa seorang kepala desa merupakan orang yang harus berkompeten dalam mengelola desa mulai dari pengetahuan, *skill*, dan moralitas yang tertuang dalam pengalaman-pengalaman dalam hal pemerintahan desa.

Dilansir dari laporan Tri (2018) di TribunSolo.com bahwa Samsul Arifin merupakan Calon Kepala Desa terpilih pada tahun 2018 di desa Tambakboyo Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Samsul merupakan kepala desa termuda di Kabupaten Sukoharjo karena usianya yang masih 28 pada saat itu. Diketahui bahwa Kandidat terpilih ini melawan petahana bernama Sriyadi di desa tersebut. perolehan suaranya yang cukup jauh, yaitu Samsul mendapatkan suara sebanyak 1.451 sedangkan Sriyadi mendapatkan suara sebanyak 1.049. Artinya selisih 402 suara yang menandakan bahwa suara Samsul Arifin juga cukup kuat di desa tersebut sebagai pendatang baru. Melihat dari persebaran suara, bahwa Samsul Arifin unggul di TPS 1 dengan jumlah suara 1.275 sedangkan Sriyadi hanya 140 suara, namun di dua TPS lainnya Samsul kalah dengan Sriyadi yaitu di TPS 2 Sriyadi unggul

dengan perolehan suara sebesar 456 sedangkan Samsul hanya 85 suara, kemudian di TPS 3 Sriyadi mendapatkan 453 suara sedangkan Samsul hanya 91 suara. Artinya di sini cukup sengit persaingan antar kandidat ini, masing-masing memiliki basis suaranya sendiri.

Samsul merupakan kategori pemuda karena usianya masih 28 tahun pada saat pencalonan sebagaimana UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 1. Artinya bahwa Samsul masih termasuk kategori orang yang masih dalam proses dalam membentuk mental yang siap membangun negeri sebagaimana UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pasal 1 ayat 4. Namun dalam syarat pencalonan kepala desa, umur tersebut sah, karena aturan pencalonan kepala desa menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 33 huruf e bahwa Kepala Desa berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. Namun, di sisi lain bahwa pemuda merupakan orang yang masih dalam tahap pembentukan dan pembangunan karakter baik dalam hal pengetahuan, *skill*, dan moralitas dalam bekerja. Apalagi lawan Samsul adalah petahana di desa tersebut, artinya secara pengalaman Samsul kalah jauh dengan lawan politiknya. Dilansir dari Tri (2018) dalam Tribunnews.com bahwa Samsul Arifin ini pada awal kariernya bekerja sebagai staf KPUD Sukoharjo, kemudian pernah juga bekerja ikut kontraktor, lalu bergabung dengan Dinas Sosial sebagai kube, dan terakhir menjadi Guru Yayasan Al-Falah Baki. Dari rekam jejak pekerjaan Samsul pun tidak banyak berkulat pada politik yang spesifik pada politik desa. Artinya ada kekuatan lain pada diri Samsul sehingga mampu memenangkan kontestasi padahal dirinya belum dikenal baik dalam hal pengelolaan desa.

Politisi harus dikenal baik oleh masyarakat dan tentunya dikenal sebagai politisi atau partai yang berbeda di antara partai atau politisi yang ada sehingga memudahkan pemilih dalam menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan mereka di mana hal tersebut bisa disebut dengan *brand* politik (Firmanzah, 2006). Menurut Less-Marshment (2011) bahwa *brand* politik merupakan lebih dari entitas psikologi yang membentuk suatu kesan, asosiasi, dan seluruh persepsi dari partai atau politisi. *Brand* terbentuk dari perilaku masa lalu dan sangat sulit untuk diganti dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang (Less-Marshment, 2011).

Pembahasan mengenai *branding* politik menjadi penting karena berbicara politik pasti juga berbicara mengenai persepsi masyarakat dalam menilai calon penguasa, apakah kandidat tersebut merepresentasikan pandangan ideal pemilih terhadap pemimpin. Less-Marshment (2011) mengatakan dalam penelitian yang ditulis oleh Cosgrove (2009) bahwa kampanye yang dilakukan Hillary pada tahun 2007-2008 memiliki kelemahan karena tidak menggunakan *brand* yang mampu membangkitkan emosi pemilih. Jokowi ketika awal kali mencalonkan sebagai gubernur Jakarta, beliau mencitrakan dirinya sebagai pejabat yang “merakyat” atau dekat dengan rakyat dengan sering belusukan ke kampung-kampung, dan itu dapat mengambil hati masyarakat Jakarta dan mampu menang melawan petahana (Sandra, 2013). Artinya bahwa *branding/citra/positioning/image* di sini sangat memengaruhi pemilih dalam memilih calon kandidat di pemilihan.

Samsul yang merupakan pendatang baru dan kandidat muda namun mampu memenangkan kontestasi desa melawan petahana, tentu ada peran *political brand* di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan *political brand* mampu menggiring pemilih melalui persepsi pemilih untuk memilih

kandidat meskipun belum dikenal baik dalam pemerintahan desa. Dalam penelitian ini, hendak membahas strategi *branding* politik dan komunikasi *branding* politik yang dilakukan Samsul dalam memenangkan pemilihan kepala desa Tambakboyo tahun 2018.

Ada beberapa penelitian yang menggunakan tema *political branding*, di antaranya penelitian milik Padang (2018) yang berjudul “Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus : Pada Kepala Desa Terpilih Rumbin Sitio di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2017)”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa Rumbin Sitio mampu memenangkan kontestasi di saat Rumbi Sitio merupakan pendatang baru yang bersuku berbeda dari masyarakat Tenggau. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh produk politik yang ditawarkan kepada pemilih mampu menjawab kebutuhan pemilih yaitu melaksanakan *good governance*, serta menggali potensi pendapatan desa demi kemajuan masyarakat dan pematangan desa. Dari penelitian tersebut strategi yang dibuat masih umum, bukan strategi *political brand*. Selain itu, menjadi pelajaran bahwa dalam memenangkan kontestasi, produk yang dibuat harus berdasarkan kebutuhan warga desa.

Lalu penelitian dari Fatmawati (2018) dalam skripsinya yang berjudul “*Political Branding* ‘Sobat Mustafa’ Dalam Pembentukan Citra Mustafa Sebagai Bakal Calon Gubernur Lampung Periode 2018-2023”. *Brand* politik tersebut dilakukan dengan cara kehumasan dan iklan yang dikomunikasikan kepada masyarakat selama sembilan bulan. Adapun *brand* tersebut juga telah dianalisis berdasarkan *segmenting, targeting, positioning* yang tepat sehingga *brand* bisa melekat kuat di benak pemilih. Penelitian ini fokus dalam obyek *political branding* namun subyeknya bukan kepala desa. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa untuk bisa menang dalam *political brand*, maka harus melalui analisis yang mendalam tentang pasar.

Selanjutnya ada penelitian dari Sandra (2013) yang berjudul “*Political Branding* Jokowi Selama Masa Kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 Di Media Sosial Twitter”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Jokowi melakukan *political branding* dengan penampilan, personalitas, dan pesan-pesan politis. Di mana hal tersebut disampaikan dengan membangun hubungan dengan pemilih, eksplorasi orisinalitas pemimpin, melek teknologi, dan ada nilai-nilai personal yang diberikan kepada pemilih. Selain itu Jokowi juga memberikan harapan, dukungan publik, laporan aktivitas serta penyampaian nilai/ideologi politik sebagai pesan politik beliau, serta penampilan yang menunjang *brand* Jokowi. Dengan begitu kesan bahwa beliau merupakan politisi yang terbuka, dekat dengan masyarakat, kredibel, dan merakyat. *Brand* dan *branding* tersebut berbeda dengan politisi lainnya, sehingga sangat mudah dikenali oleh masyarakat. Dari penelitian tersebut membahas mengenai *political brand*, namun secara subyek bukan kepala desa. Selain itu, dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *political brand* kuat dengan pesan-pesan tersirat.

Lalu ada pula penelitian dari Shinta dan Novita dari Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta yang berjudul “Personal Branding Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa *personal branding* merupakan strategi yang efisien karena lebih banyak pada pendekatan personal sedangkan kampanye membutuhkan banyak biaya. Namun kepala daerah harus memiliki kemampuan, *attitude*, dan cara yang tepat dalam mem-*branding*-kan diri mereka sehingga benar-benar

melekat dalam benak pemilih. Dari penelitian tersebut membahas mengenai *political branding*, namun secara subyek lebih kepada gubernur, bukan kepala desa. Selain itu, dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa *political branding* di sini lebih mengeksplor *personal* dari calon kepala daerahnya, sehingga yang disampaikan berupa kepribadian dan kemampuan calon.

Dari penelitian yang ada, menunjukkan bahwa sebagian besar peneliti lebih berfokus pada strategi pengomunikasian *political brand* mereka. Sedangkan sedikit sekali penelitian mengenai proses perumusan *political brand* dan strategi komunikasi *political brand* sehingga akan terlihat jelas tujuan dan implementasi politisi di lapangan. Selain itu, penelitian di atas belum ada yang spesifik membahas *political brand* dalam kontestasi kepala desa. Penelitian ini hendak menambah khazanah keilmuan dalam perumusan *brand* politik dan komunikasi *brand* politik dalam bidang *marketing* politik spesifik pada kajian *brand* politik. Dari penelitian ini diharapkan peneliti berikutnya untuk melanjutkan kajian strategi *political brand* atau melanjutkan penelitian pada konteks desa Tambakboyo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan Samsul Arifin dan koordinator tim sukses Samsul yaitu Yosep. Selain itu, data juga diambil dalam bentuk data sekunder untuk melihat detail data yang telah disampaikan oleh Samsul maupun koordinator tim Samsul. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung dari pihak utama terkait proses Samsul dan tim merumuskan dan melakukan komunikasi *brand* politik hingga *brand* politik tersebut diterima masyarakat dan menang dalam kontestasi.

PERPOLITIKAN DI DESA TAMBAKBOYO

Warga desa Tambakboyo sangat agresif dalam perpolitikan desa apabila dibandingkan politik yang berskala kabupaten, provinsi, maupun negara. Bahkan hanya karena politik bisa konflik berkepanjangan antar warga. Warga berpolitik berdasarkan segmen pemilih yaitu dusun I dan dusun II. Hal ini disebabkan karena adanya kondisi wilayah geografis yang memisahkan antara dusun I dengan dusun II dengan jarak yang cukup jauh. Samsul mengatakan bahwa untuk menuju dusun II dari dusun I menempuh jarak 8 kilometer melalui Serenan, Klaten, Bulakan, dan Kriwen (Tri, 2019). Hal tersebut dikarenakan kedua dusun ini terpisah oleh dua sungai, yaitu sungai Bengawan Solo dan sungai Tengking, sehingga warga harus berputar melewati desa dan kabupaten lain. Kondisi dusun yang jauh menyebabkan warga harus memilih kandidat yang berasal dari dusun mereka masing-masing. Dengan begitu, kepala desa terpilih akan melayani penuh dusun dia berasal. Hal tersebut yang menyebabkan agresifnya warga desa dalam perpolitikan desa. Artinya persaingan antar warga dusun akan sangat kuat pada saat pemilihan kepala desa.

Apabila melihat jumlah pemilih di tiap dusunnya, maka jumlah pemilih dusun I 200 orang lebih banyak daripada dusun II (Yosep, 2019). Artinya secara logika sederhana, dusun I akan selalu memenangkan kontestasi. Namun faktanya justru sebaliknya, kepala desa selama 32 tahun ke belakang merupakan kepala desa yang berasal dari dusun II (Yosep, 2019). Hal tersebut dikarenakan adanya 2

kandidat di dusun I, sehingga mereka berebut suara di dusun I. Artinya bahwa mempersilahkan kandidat dari dusun II untuk menang, karena hanya perlu mengondisikan pemilihnya dari dusun II.

Yosep (2019) mengemukakan bahwa situasi tersebut membuat ketegangan antar warga dusun I karena perbedaan pilihan. Di pemilihan berikutnya justru salah satu kandidat yang bersitegang dengan kandidat di dusun I berkoalisi dengan kandidat dari dusun II, sehingga semakin menguatkan kandidat dari dusun II karena suaranya bertambah dari dusun I. Oleh karena itu, menyebabkan selama 32 tahun atau 5 kali pemilihan kepala desa selalu dimenangkan oleh kandidat dari dusun II. Kondisi tersebut merupakan hal yang berat oleh Samsul Arifin yang merupakan kandidat dari dusun I, karena adanya dua kelompok warga yang bersitegang.

MENTAL MAP (PETA KEBUTUHAN DAN KEINGINAN PASAR PEMILIH)

Dalam tahap identifikasi “mental map” ini yang dicari adalah bagaimana pandangan pasar terhadap pimpinan yang ideal yang dalam penelitian ini makna pemimpin adalah kepala desa (Downer, 2016). Samsul (2019) dan Yosep (2019) menyatakan bahwa pasar pemilih yang mereka bidik memiliki pandangan terhadap pemimpin yang 1) dekat dengan rakyat (berasal dari dusun I), 2) memiliki misi pelayanan 24 jam, 3) Transparan dalam hal keuangan, 4) Memiliki misi membangun desa, 5) Memiliki misi untuk membenahi birokrasi pemerintahan desa. Adapun segmen pemilih yang mereka bidik adalah segmen dusun I. Alasan mengapa Samsul dan tim membidik dusun I adalah karena memang Samsul berasal dari dusun I dan juga Samsul diangkat langsung dari kesepakatan antara beberapa pengurus RT di dusun I dengan pemuda. Barulah setelah itu, citra Samsul dibuat berdasarkan keinginan dan kebutuhan warga dusun I secara lebih lanjut.

Berdasarkan kebutuhan dan keinginan warga dusun I sebagaimana disebutkan sebelumnya, memiliki arti bahwa kebutuhan dan keinginan tersebut harus tercitrakan pada diri Samsul. Artinya bahwa hal tersebut menjadi dasar dalam pembuatan *brand* politik. Di sini menunjukkan bahwa Samsul dan tim sudah melakukan tahap identifikasi kebutuhan dan keinginan warga dengan baik yang kemudian ditindaklanjuti di tahap berikutnya. Tentunya bukan hanya hal tersebut yang menjadi dasar pijakan, mengingat *brand* politik terbentuk dari pasar pemilih serta berbeda dari kompetitor, artinya setelah tahap ini perlu dilakukan identifikasi dan analisis kompetitor.

COMPETITIVE FRAME OF REFERENCE (KERANGKA ACUAN KOMPETISI)

Di tahap ini, kandidat harus memetakan siapa saja lawan dan seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh lawan tersebut, mulai dari latar belakang, prestasi, *skill*, moralitas, kedekatan dengan pemilih dan selainnya (Downer, 2016). Dalam pemilihan kepala desa Tambakboyo 2018, terdapat dua calon kepala desa, yaitu Samsul Arifin dan Sriyadi (Tri, 2018). Artinya bahwa di sini yang menjadi lawan dari Samsul hanya ada satu orang. Dengan begitu, fokus pertarungan Samsul bisa fokus dan relatif mudah dalam mem-*branding*-kan diri dalam kontestasi. Hal tersebut dikarenakan Samsul hanya perlu menjadi negasi dari lawannya dan memosisikan diri di segmen pemilih yang sudah ditarget oleh Samsul.

Adapun menurut beberapa sumber data mulai dari Samsul (2019), Yosep (2019), dan Tri (2018) yang menjadi kerangka acuan kompetitif adalah :

1. Lawan dari Samsul hanya Sriyadi
2. Sriyadi merupakan calon petahana 2 periode, sehingga lebih berpengalaman daripada Samsul
3. Secara level pendidikan sama dengan Samsul yaitu lulusan strata 1
4. Secara agama Islam
5. Secara posisi tempat tinggal berasal dari dusun II.

POINTS OF DIFFERENCE (TITIK PERBEDAAN)

Dalam tahap ini hendak mencari titik perbedaan kandidat dengan kompetitor sehingga menjadikan *brand* politik menjadi kuat, menguntungkan, dan unik (Downer, 2016). Samsul dan tim menangkap perbedaan antara Samsul dengan lawan politiknya adalah secara usia yang jauh lebih muda dari lawan. Lalu secara pengalaman kerja, lawan lebih berpengalaman dibanding Samsul karena sudah menjabat selama 2 periode. Bahkan di atas telah dibahas bahwa Samsul tidak ada latar belakang pendidikan dan pekerjaan dalam berpolitik maupun pengelolaan desa. Lalu secara asal dusun, Samsul adalah kandidat dari dusun I, sedangkan lawan dari dusun II. kemudian Samsul maju atas permintaan warga dusun I sedangkan lawan mencalonkan sendiri. Yang terakhir, bahwa Samsul memiliki kedekatan dengan warga dusun I dibanding pihak lawan.

Di sini yang menjadi pijakan adalah pasar pemilih yang telah ditetapkan oleh Samsul dan tim, yaitu dusun I. Hal yang paling mencolok yang menjadi kekuatan penuh bagi pihak Samsul adalah bahwa Samsul berasal dari dusun I, diusung langsung oleh warga dusun I, serta memiliki kedekatan dengan warga dusun I. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa yang menjadi keutamaan warga desa adalah asal dan kedekatan dengan warga, artinya jika dusun I yang dibidik maka kepala desa harus berasal dari dusun I. Perbedaan yang menjadi kekuatan Samsul berikutnya adalah Samsul masih muda, sehingga bisa dieksplor bahwa pemuda langkahnya lebih cepat dalam bekerja dan berinovasi. Lalu perbedaan yang menurut penulis menjadi kelemahan adalah pengalaman Samsul dan lawan politiknya sangat jauh berbeda. Lawan Samsul sudah 2 periode memimpin desa Tambakboyo, sedangkan Samsul belum ada pengalaman. Artinya bahwa hal tersebut jangan dieksplor dalam kampanye, apalagi dijadikan *brand* politik karena sama dengan menyuruh pihak lawan untuk menang. Tim Samsul cukup signifikan dalam melihat perbedaan antara timnya dengan pihak lawan, meskipun belum semua aspek diidentifikasi oleh mereka, namun tim Samsul mampu melihat substansi perbedaan antara pihaknya dengan lawan.

POINTS OF PARITY (TITIK PERSAMAAN)

Dalam tahap ini yang menjadi fokus di sini adalah bagaimana kandidat memperkecil risiko dalam pembuatan *brand* politiknya dengan cara mencari titik persamaan yang dimiliki oleh kandidat dengan pesaing (Downer, 2016). Hal ini dilakukan agar *brand* politik yang dibuat tidak ada kesamaan dengan pesaing sehingga *brand* politik benar-benar mampu membedakan dengan pesaing dan kompetitif di benak pemilih. Persamaan dari kedua kandidat tersebut adalah bahwa mereka keduanya adalah orang

yang berpendidikan tinggi di desa tersebut. Artinya bahwa ketika hal ini dieksplor, tidak akan ada yang menarik di antara keduanya, karena tingkat pendidikannya sejajar, sehingga jika mau dibanggakan pun tidak ada yang menarik.

Berdasarkan agama, bahwa keduanya merupakan muslim, sehingga isu tentang pemimpin muslim pun tidak akan menjadi *booming* meskipun 99% warga desa Tambakboyo adalah muslim, kecuali kandidat lawan beragama non muslim, maka hal tersebut bisa dieksplor. Selain hal tersebut, tidak ada persamaan lagi di mata pemilih (segmen dusun I) karena semuanya berbeda di mata pemilih (khususnya segmen dusun I), baik dari segi asal dusun, usia, citra, maupun keinginan warga dusun I akan adanya pemimpin dari dusun I. Artinya bahwa dua hal tersebut tidak akan menunjukkan perbedaan *brand* politik apabila diangkat oleh Samsul Arifin di pemilihan kepala desa 2018. Selain hal yang telah disebutkan, merupakan perbedaan antara Samsul dengan Sriyadi, sehingga bisa dieksplor yang menjadi kekuatan untuk dijadikan *brand* politik.

BRAND VALUE AND MANTRA (NILAI BRAND DAN MANTRA)

Pada tahap ini adalah kandidat menentukan nilai inti dari *brand* politiknya (Downer, 2016). Selain itu, kandidat juga mulai merumuskan mantra yang tepat untuk menggambarkan *brand value*-nya setidaknya tiga hingga lima kata atau dalam bentuk lain (Downer, 2016). Secara umum, *brand value* yang dibuat oleh Samsul dan tim adalah 1) pemuda desa yang dekat dengan warga, 2) pemuda desa yang akan peduli, dan siap untuk membangun desa, 3) pemuda desa yang akan mengelola pemerintahan secara disiplin, 4) pemuda desa yang akan memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat, 5) pemuda desa yang akan transparan dan bertanggung jawab dalam hal keuangan desa. Kemudian *brand value* tersebut dituangkan dalam beberapa hal, seperti visi misi, slogan, serta simbol & istilah.

Visi yang dicanangkan oleh Samsul dan tim adalah “Mensejahterakan masyarakat desa Tambakboyo”. Visi tersebut dilakukan dengan misi 1) bekerja sama dengan masyarakat dalam membangun desa, 2) mengingat kebutuhan masyarakat desa Tambakboyo, 3) transparan dan bertanggung jawab atas keuangan desa. Terdapat pula beberapa slogan yang dibuat, pertama “Tambakboyo ‘BISA’” yang merupakan singkatan yang berisikan semangat pembangunan sebagaimana visi & misi yang dibuat, yaitu 1) Bersama membangun Desa, 2) Ingat kebutuhan masyarakat, 3) Selalu transparan dan tanggung jawab, 4) Agar masyarakat Sejahtera. Kedua, yaitu “Bersatu Untuk Maju” di mana slogan tersebut merupakan lanjutan dari Tambakboyo “BISA” yang ditulis dalam kertas pendaftaran yang ditunjukkan oleh Samsul, kemudian dibuat satu kalimat pendek berisi ajakan untuk masyarakat untuk bersatu dan memajukan desa serta membuktikan bahwa dengan bersatu maka Tambakboyo “BISA” maju.

Ketiga, yaitu “Revolusi Mental” merupakan warga desa ingin perubahan dalam hal pelayanan, karena warga sudah mual dengan pelayanan selama ini, misalnya dalam hal kedisiplinan jam buka balai desa. Selain itu, warga juga menginginkan adanya ketransparanan dalam hal keuangan desa, karena selama ini tidak pernah ditunjukkan kepada warga desa. Revolusi Mental ini merupakan kata-kata pendek yang mencakup keseluruhan dari *brand value*. Samsul Arifin hendak mem-*branding*-kan dirinya

sebagai calon kepala desa yang siap untuk merevolusi Tambakboyo, artinya perubahan secara besar terkait apa yang selama ini menjadi masalah desa Tambakboyo. Kemudian mental di sini menggambarkan masyarakat Tambakboyo itu sendiri. Dari sini didapatkan bahwa Revolusi mental berarti hendak melakukan perubahan besar kepada masyarakat agar maju dengan membenahi sistem pemerintahan dan pola pembangunan desa, mulai dari transparansi dan tanggung jawab penggunaan keuangan desa, kedisiplinan birokrasi pemerintahan desa, pelayanan yang masih belum optimal kepada masyarakat, dan selainnya. Peneliti memaknai bahwa kata revolusi diangkat di sini karena selama bertahun-tahun desa Tambakboyo belum ada kemajuan yang signifikan.

Selanjutnya ada simbol dan istilah, yang pertama yaitu “TAMBAKBOYO SIAP MENGANTARMU KE ISTANA” yang berarti warga desa siap mengantar Samsul Arifin untuk duduk di kursi kepala desa yang berlokasi di balai desa dengan sebutan “Istana”. Makna tulisan tersebut merupakan motivasi warga desa untuk membawa Samsul memenangkan kontestasi sehingga Samsul bisa duduk untuk menjabat di balai desa. Kedua, yaitu warna merah diambil karena menggambarkan desa Tambakboyo merupakan basis masa dari PDI-P yang bahkan 94% dalam pemilihan presiden mendukung PDI-P. Hal ini cukup menguntungkan karena warna merah sudah sangat melekat di warga desa sehingga persepsi tentang warna merah di warga mampu mengarahkan untuk memilih Samsul Arifin.

POLITICAL BRAND CAMPAIGN STRATEGIES (STRATEGI KAMPANYE BRAND POLITIK)

Dalam melakukan *message dissemination* (kampanye), ada dua hal yang bisa dilakukan, yaitu kampanye langsung dan kampanye tidak langsung (Cwalina et al., 2015). Kampanye langsung dilakukan politisi, tim, atau relawan yang bersinggungan langsung dengan pasar pemilih (Cwalina et al., 2015). Sedangkan kampanye tidak langsung merupakan cara politisi menyampaikan pesan tanpa bersinggungan langsung dengan pasar pemilih (Cwalina et al., 2015). Ada beberapa cara yang digunakan Samsul dan tim dalam mengkampanyekan *brand* politik ketika pemilihan kepala desa Tambakboyo 2018 kemarin. Kampanye tersebut dilakukan dengan cara langsung bertatap muka dengan warga dan tidak langsung atau menggunakan media untuk mengondisikan persepsi warga untuk tetap mendukung Samsul Arifin hingga pencoblosan. Pertama, tim Samsul melakukan kerja sama dengan RT dalam hal pengangkatan Samsul. Melihat adanya konflik antar warga dusun I, dilakukan pencarian calon yang bebas dari konflik dan diputuskan yaitu Samsul. Strategi tersebut penting untuk mewujudkan mimpi dusun I agar memiliki kepala desa. Dalam proses tersebut juga dilakukan mediasi antar calon yang pernah berkonflik untuk mau mendukung Samsul dalam kontestasi kali ini, sehingga suara dari dusun I tidak terpisah lagi. Setelah pihak-pihak yang terlibat sudah sepakat, pemuda memiliki peran dalam hal mengondisikan orang tua mereka masing-masing untuk mau mendukung Samsul dalam pemilihan kepala desa 2018.

Tahap selanjutnya adalah melakukan sosialisasi di perkumpulan RT. Pemuda desa yang menjadi subyeknya, yaitu menyampaikan visi misi, pelayanan 24 jam, serta keunggulan Samsul Arifin

sebagaimana yang telah dikonsepsikan sebelumnya. Sosialisasi tersebut dilakukan di 12 RT yang ada di dusun I. Samsul secara pribadi juga melakukan kunjungan ke warga-warga dusun I untuk meminta do'a restu. Menurut peneliti hal ini dilakukan untuk sekaligus memastikan semua warga mendukung dirinya. Pada saat pendaftaran calon kepala desa, Samsul menyampaikan orasi kepada warga yang hadir, adapun yang disampaikan adalah visi & misi serta yang paling menonjol yaitu tentang penggunaan dana desa yang seharusnya untuk desa bukan untuk kepala desa. Hal tersebut dilakukan untuk mengingatkan warga bahwa selama ini uang desa tidak terlihat dan hal ini yang menjadi keinginan warga serta Samsul menjadikan *highlight* dalam orasinya, sehingga terbentuk *brand* politik bahwa dirinya siap mengubah desa menjadi lebih baik lagi.

Selain itu, tim Samsul juga membentuk tim sayap Samsul yang berfungsi untuk mengondisikan warga agar tetap berada pada pihak Samsul. Tim ini dibuat per RT dengan komposisi tim berisikan RT dan 10 anggota. Apabila dalam satu RT terdapat 50 KK, maka tim tersebut bertanggung jawab untuk mengondisikan 50 KK tersebut hingga pencoblosan. Usaha dalam mengondisikan warga diperkuat dengan strategi anti-serangan fajar. Strategi ini dilakukan dengan cara blokade jalan guna menyaring orang-orang dari luar desa yang masuk ke wilayah dusun I. Memperketat orang asing yang masuk ke dusun I, seperti misalnya diwawancarai terlebih dahulu, apabila ada keperluan di salah satu warga desa, maka didampingi dan ditunggu di depan rumah hingga selesai urusan. Apabila diketahui orang asing tersebut membawa uang, maka berpotensi melakukan serangan fajar, mengingat kondisi ekonomi warga yang cenderung menengah ke bawah, maka sekuat apa pun keinginan untuk mendukung Samsul, apabila diberi uang, maka kemungkinan untuk memilih lawan juga besar.

Berikutnya adalah strategi kampanye tidak langsung. Samsul dan tim berinisiatif membuat baju untuk mendukung Samsul. Baju tersebut berwarna merah dengan bagian depan tertulis "Revolusi Mental" dan bagian belakang tertulis "TAMBAKBOYO SIAP MENGANTARMU MENUJU ISTANA". Adapun secara makna sudah dijelaskan di bab sebelumnya. Sistem pembuatan baju tersebut bukan paksaan, melainkan warga yang ingin membuat harus membayar Rp 70.000,00. Bahkan dikatakan baju ini total menghabiskan dana sekitar Rp 26.000.000,00 artinya baju yang terbuat sejumlah 372 orang. Dengan sistem tersebut, setidaknya membantu untuk mendeteksi musuh dalam selimut.

Samsul dan tim berpendapat bahwa ketika mereka berani mengorbankan Rp 70.000,00 untuk membuat baju, maka bisa dipastikan bahwa mereka di pihak Samsul. Selain itu menurut peneliti, baju ini juga berfungsi sebagai pengondisi warga untuk tetap mendukung Samsul, karena baju ini sering dipakai sehingga warga teringat terus. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai jawaban orang-orang yang belum menentukan pilihan, karena banyaknya warga yang membuat, maka orang tersebut bisa terpengaruh untuk ikut membuat dan memilih Samsul. Terlebih jika pemuda tidak membuat baju tersebut, maka akan sangat mudah terdeteksi bahwa dirinya di lain pihak, sehingga bisa menimbulkan ketegangan sosial antar pemuda. Artinya bahwa baju tersebut mampu menjadi alat paksa secara tidak langsung untuk mendukung Samsul.

Kampanye tidak langsung berikutnya adalah penggunaan MMT. Pemasangan MMT dilakukan hanya di dusun I. MMT di sini berguna untuk mengondisikan pikiran warga untuk mendukung Samsul.

Hal tersebut dikarenakan MMT dipasang di pos-pos dan di jalan-jalan, sehingga warga dusun I akan sering melihat MMT tersebut dan terbiasa dengan itu. Dengan begitu, karena sudah terbiasa, maka mampu menggiring warga untuk tetap mendukung Samsul, meskipun secara efek tidak langsung dan besar, namun mampu melengkapi usaha-usaha kampanye maupun pengondisian yang sudah dilakukan oleh Samsul dan tim.

HAMBATAN KAMPANYE *BRAND* POLITIK

Dalam proses membuat *brand* politik kepada warga desa, tentukan bukan hanya disosialisasikan, namun perlu juga dipertahankan. Namun dalam proses tersebut terdapat hambatan sehingga proses terbentuknya *brand* politik menjadi tidak sempurna dan kacau. Adapun hambatan yang dialami oleh Samsul dan tim adalah pertama, adanya salah satu RT yang tidak mau diajak mendukung Samsul. Mengingat Samsul membuat tim sayap Samsul untuk mengondisikan tiap RT yang berisikan ketua RT di sana. Namun tim Samsul menyiasati untuk memperkecil gerak ketua RT tersebut sehingga tidak bisa memengaruhi warga lainnya. Hambatan yang kedua adalah adanya musuh dalam selimut. Samsul dan tim mengakui hal ini yang paling sulit dideteksi karena musuh berada bersama-sama mereka namun tidak terlihat bahwa dia adalah musuh. Solusi yang dibuat oleh tim Samsul adalah membuat tim penyelidik apabila ada orang-orang yang diindikasikan musuh dalam selimut, jika sudah terkonfirmasi, maka diambil tindakan untuk memperkecil gerak musuh tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Strategi *brand* politik dari Samsul Arifin adalah pemuda yang hendak merevolusi mental desa Tambakboyo. Samsul datang untuk memenangkan dusun I dan mengubah sistem pemerintahan dari petahana yang rusak. Strategi *branding* politik tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa hal, yaitu visi & misi, slogan, dan simbol & istilah. Kemudian dikomunikasikan dengan berbagai cara yaitu membuat kesepakatan antara pemuda dengan sesepuh desa, pemuda mengondisikan masing-masing orang tua, sosialisasi ke perkumpulan RT, meminta doa restu ke rumah-rumah warga, orasi saat pendaftaran calon kepala desa, membentuk tim Sayap Samsul untuk mengondisikan warga tiap RT, serta melakukan anti-serangan fajar. Lalu tim Samsul juga melakukan kampanye tidak langsung yaitu pembuatan baju Samsul yang berfungsi untuk deteksi musuh dan memengaruhi pilihan warga, serta menggunakan MMT untuk mengondisikan pikiran warga terhadap Samsul hingga pencoblosan.

Dari strategi tersebut di atas sudah sesuai dengan bagaimana kaidah dalam strategi *brand* politik. kandidat wajib menyampaikan *brand* politik dengan berbagai cara dan pengondisian untuk tetap menjaga pikiran warga terhadap kandidat tertentu. *Brand* politik sangat berperan besar dalam politik, terlebih bagi pendatang baru, karena warga tidak mengetahui bagaimana kandidat tersebut di lapangan dan mampu menggiring warga mendukung kandidat tertentu hanya dengan bayang-bayang persepsi.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Samsul Arifin sukses mengalahkan petahana dengan *political brand*. Samsul yang berusia muda, belum memiliki pengalaman dalam pemerintahan desa dan tidak memiliki latar belakang politik justru bisa mengalahkan petahana 2 periode. Dari sini dapat

dipelajari bahwa dalam membuat *political brand*, harus mampu memahami permasalahan inti dari kontestasi desa terlebih dahulu. Kemudian memahami bagaimana pasar pemilih menginginkan sosok pemimpin yang ideal. Setelah itu, harus memahami bagaimana kekurangan yang dimiliki lawan untuk kemudian dieksplor apa yang lebih dari diri sendiri. Dengan begitu pasar pemilih seakan dituntun untuk memilih kandidat tertentu karena persepsi yang dibuat oleh kandidat. Lalu, dalam mengomunikasikan *brand* politik, perilaku kandidat dan tim harus selaras dengan apa yang sudah direncanakan, tidak boleh sedikit pun menyimpang. Apabila menyimpang, *brand* tersebut justru tidak membentuk persepsi baik di masyarakat. Selain itu, sosok pemuda yang dianggap belum mampu memimpin desa, dianggap masih butuh belajar, ternyata bisa meyakinkan masyarakat desa dalam pembangunan enam tahun ke depan. Artinya bahwa pemuda yang ada di Indonesia harus tetap optimis dan maju untuk berkontribusi dalam pembangunan negara, baik tingkat desa hingga negara.

Yang terpenting adalah bagaimana *brand* politik tersebut tetap dipertahankan oleh politisi. Apabila terjadi perbedaan perilaku dengan apa yang sudah dicitrakan kepada masyarakat, maka *brand* tersebut akan rusak. Ketika *brand* politik sudah rusak, maka perlu melakukan *rebranding*, di mana *rebranding* adalah proses yang sangat sulit dan lama, karena harus mengobati luka warga terhadap kebohongan yang dilakukan politisi, ibarat kertas yang sudah diremas ketika dibuka lagi, bekas remasan tersebut masih ada dan tidak bisa kembali ke kertas yang rapi seperti sebelumnya. Artinya bahwa *brand* politik bukan hanya sekedar alat pemenangan dengan membohongi rakyat, melainkan alat untuk menunjukkan kualitas politisi yang sebenarnya bukan hanya rekayasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin S (2019) Strategi Political Branding dan Kampanye Samsul Arifin [Wawancara] 24 September 2019.
- Cangara H (2009) Komunikasi Politik. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. (Bibliography)
- Cwalina W, Falkowski A, & Newman BI (2015) Political Marketing: Theoretical and Strategic Foundations. New York: Routledge.
- Downer L (2016) Political Branding Strategies: Campaigning and Governing Australian Politics. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Fatmawati A (2018) Political Branding "Sobat Mustofa" Dalam Pembentukan Citra Mustafa Sebagai Bakal Calon Gubernur Lampung Periode 2018-2023. Lampung: Universitas Lampung.
- Kartohadikoesoemo S (1984) Desa. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Less-Marshment J (2011) The Political Marketing Game. New Zealand: Palgrave Macmillan.
- Padang RH (2018) Strategi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pada Kepala Desa Terpilih Rumbin Sitio di Desa Tenggau Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Tahun 2017). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sandra LJ (2013) Political branding Jokowi selama masa kampanye Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2012 di media sosial Twitter. Jurnal E-komunikasi, 1(2), 286.
- Surbakti R (2010) Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Widiasrana Indonesia. (Bibliography)
- Surya SD & Putri ND (2008) Personal Branding dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta: Universitas Indraprasta PGRI. (Bibliography)

- Tri A (2018) Cerita Kades Termuda Umur 28 Tahun di Sukoharjo, Guru Yayasan yang Bisa Kalahkan Petahana. Diakses 8 September 2019, dari <https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/26/cerita-kades-termuda-umur-28-tahun-di-sukoharjo-guru-yayasan-yang-bisa-kalahkan-petahana>
- Tri A (2019) Warga Desa Tambakboyo Sukoharjo Butuh Jembatan Permanen, Saat Ini Terpaksa Buat dengan Sesek Bambu. Diakses 27 Oktober 2019, dari <https://solo.tribunnews.com/2019/10/07/warga-desa-tambakboyo-sukoharjo-butuh-jembatan-permanen-saat-ini-terpaksa-buat-dengan-sesek-bambu>
- Yosep (2019) Strategi Political Branding dan Kampanye Samsul Arifin [Wawancara] 25 September 2019.

PILKADA CALON TUNGGAL DI KABUPATEN PATI TAHUN 2017: SUATU TINJAUAN OLIGARKISME PARPOL

Achmad Ronggo Prihatmono¹

¹ *Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
ronggoronggo170@gmail.com*

Abstract: *The phenomenon of a single candidate lately happens a lot in Indonesia, especially in the sphere of local election democratic parties. In the elections held simultaneously in Indonesia in 2017, many regions in the elections were only attended by one candidate pair. This makes the climate of competition in democracy not as expected with democracy. Democracy aims to make elite circulation happen, so that the ruling elite does not dominate so that it becomes an oligarchy. Democracy can turn into an oligarchy if a small group of groups dominates and tries to maintain power in order to remain in the circle of power. We have encountered many oligarchs in political parties, where the DPP of political parties determines the direction of political parties, even in determining the candidates to be carried by political parties in the elections and political lobbying in forming coalitions. The author uses the theory of iron oligarchy Robert Michels as an analytical aid. The research method uses descriptive qualitative research methods in explaining the phenomena that occur. Research data obtained through in-depth interviews with informants. The results show that the phenomenon of a single candidate is not always due to the high electability of a candidate pair, it can also occur because of the dominant oligarchy in political parties at the central level affects to the regional level.*

Keywords: *single candidates, democracy, oligarch.*

PENDAHULUAN

Pergantian kepemimpinan yang terjadi dalam sistem demokrasi dilakukan dengan melalui pemilihan terhadap calon pemimpin. Pemilihan tersebut sebagai wujud dari kedaulatan rakyat berupa hak rakyat untuk memilih calon pemimpin. Sebagai upaya mewujudkan demokrasi pada tingkat lokal, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat pertama kali dibuatlah Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bagian kedelapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, menjadi dasar dilaksanakannya pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2013. Pelaksanaan pilkada tersebut dilaksanakan secara terpisah waktunya di setiap daerah karena mekanisme waktu dari pelaksanaan pilkada masih belum ditentukan.

Tahun 2015, dibuat UU No. 8 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 2015 mengalami permasalahan, yaitu dalam pilkada serentak harus terdapat sedikitnya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sedangkan di beberapa daerah masih terdapat calon tunggal saja. Hal ini mengakibatkan ditundanya pilkada di beberapa daerah di Indonesia dengan harapan akan muncul calon lain yang menjadi lawan dalam pilkada. Karena Undang-undang tidak dapat menunda pelaksanaan pilkada dengan tanpa batasan waktu, maka diperbarui dengan UU No. 10 tahun 2016 tentang perubahan

kedua pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang memperbolehkan pelaksanaan pilkada dengan satu pasangan calon saja, namun pasangan calon tunggal harus melawan kotak kosong. Artinya rakyat di daerah tersebut mempunyai hak untuk memilih setuju atau tidak calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara langsung, sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 pertama kali telah berhasil dilaksanakan pada tahun 2005. Pelaksanaan pilkada langsung diselenggarakan untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki kaitan dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang ada dalam prinsip sebuah negara demokratis. Melalui penyelenggaraan pilkada langsung berarti demokrasi pada tingkat lokal telah berhasil mencapai tujuan-tujuan dasarnya, yaitu memilih kepala daerah melalui sebuah mekanisme pemilihan yang demokratis yang bebas, adil dan dengan tanpa kekerasan. Selain itu kepala daerah yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara langsung, memiliki legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung.

Penelitian sebelumnya mengenai fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 pernah dilakukan oleh Safira Yuristianti, yang meneliti mengenai sistem rekrutmen calon oleh partai politik. Dalam penelitian tersebut, membahas tentang bagaimana sistem rekrutmen yang dijalankan oleh masing-masing partai politik dan sisi pragmatisme partai politik dalam mengusung calon. Partai politik mengorbankan ideologi partai dengan menjalin koalisi dengan partai politik yang bahkan ideologinya berseberangan antar partai, akhirnya muncul fenomena calon tunggal dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Alusia Prita Parahita, meneliti kemenangan kotak kosong dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati tahun 2017, membahas tentang kemenangan kotak kosong mengalahkan pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful. Penelitian ini memiliki kelemahan karena yang menang adalah pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful, kotak kosong hanya menang di beberapa desa saja. Siti Dwi Puspitasari, meneliti tentang peran AKDPP dalam kemenangan kotak kosong di Desa Gajahmati dan Desa Maitan pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu lebih pro terhadap AKDPP dan tidak menyoroti bahwa di balik AKDPP juga terdapat kepentingan elit politik dan tidak murni dari rakyat.

Penelitian ini membahas mengenai oligarkisme partai politik dalam fenomena calon tunggal pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena masih belum banyak penelitian yang meneliti bagaimana oligarkisme partai dalam menyebabkan munculnya calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Terjadinya calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 dapat terjadi karena sifat oligarkisme partai yang mengikuti kehendak dari pimpinan partai. Bahkan dalam ranah pilkada, DPP partai memegang kuasa untuk memberikan surat rekomendasi terhadap siapa calon yang akan diusung oleh partai dan dalam membentuk koalisi dengan partai politik lain dengan tujuan memenangkan pasangan calon yang diusung, disertai dengan lobi politik dan politik transaksional antar partai. Selain tujuan untuk tetap berada di lingkaran kekuasaan, partai politik juga mendapatkan keuntungan finansial dari pasangan calon yang diusung. Pasangan calon Haryanto-Saiful menjadi calon tunggal dengan mendapatkan dukungan dari koalisi delapan partai politik. Selain sebagai

petahana, kekuatan modal yang dimiliki oleh pasangan Haryanto-Saiful menjadi daya tarik bagi partai politik agar mau menjadi kendaraan politik bagi pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017

Proses terjadinya fenomena calon tunggal dapat dibagi menjadi dua pola. Pertama, selama masa pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar di KPUD sampai berakhirnya proses seleksi dan pengumuman. Kedua, sebenarnya sudah ada lebih dari satu calon yang mendaftar sebagai calon kepala daerah di KPUD namun yang lolos dalam proses seleksi dan berhak untuk mengikuti proses pilkada hanya satu pasangan calon saja. Pada kasus pola yang pertama yaitu, calon pasangan tersebut kebanyakan merupakan petahana yang memiliki elektabilitas yang tinggi sehingga, mendominasi dalam pilkada yang menyebabkan mundurnya calon-calon potensial untuk mendaftarkan diri dalam pilkada. Sedangkan untuk pola yang kedua terjadi karena pasangan calon yang lain mengundurkan diri pada saat berlangsungnya proses seleksi atau mereka tidak melengkapi syarat-syarat sebagai calon dalam pilkada sehingga gugur dalam proses seleksi.

Fenomena yang menarik dari diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kapitalisasi dalam proses pemilihan kepala daerah berupa money politics dan politik transaksional (Amirudin & Bisri, 2006). Munculnya kapitalisasi dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab dari mahalnya biaya yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah, dari model pemilihan yang sebelumnya dipilih oleh DPRD atas persetujuan dari pemerintah pusat. Hal ini dapat menjadi celah untuk dimanfaatkan oleh para elit politik yang tidak hanya berkompetisi untuk mengejar kekuasaan semata namun, sekaligus juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari pesta demokrasi lokal pemilihan kepala daerah.

Fenomena yang terjadi pada pilkada langsung Kabupaten Pati tahun 2017 hanya ada calon tunggal yang juga merupakan petahana, yaitu pasangan calon Haryanto dan Saiful Arifin yang maju mencalonkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tidak ada yang menjadi lawan dari pasangan calon Haryanto-Saiful sehingga, pasangan calon Haryanto-Saiful melawan kotak kosong dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Sebelumnya belum ada fenomena calon tunggal pada Pilkada yang dilangsungkan di Kabupaten Pati, baru pada pilkada pada tahun 2017 pertama kali terjadi fenomena calon tunggal pada pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Pati.

Berdasarkan pada fenomena yang terjadi dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, menunjukkan bahwa dalam pilkada tersebut masih belum dapat untuk dikatakan sebagai pilkada yang aspiratif dan demokratis, karena pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 masih belum kompetitif, artinya dalam pilkada tersebut Haryanto sebagai petahana tidak mempunyai lawan yang menjadi kompetitornya dalam Pilkada Pati 2017, dan menjadi satu-satunya calon yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pati. Dari adanya fenomena calon tunggal ini mempunyai implikasi terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, karena yang diharapkan dengan adanya demokrasi akan ada sirkulasi elit, sedangkan dalam demokrasi yang masih dikuasai oleh oligarki menyebabkan sirkuasi elit yang ada tidak berjalan dengan baik. Dapat dikatakan terjadi sirkuasi dalam elit, namun yang menjadi permasalahan adalah perputaran elit yang ada hanya berotasi dalam lingkup lingkaran oligarki elit

tersebut. Melalui cara ini, oligarki mempertahankan dominasi politik dengan menutup jalan bagi pesaing politik yang dapat melengserkan mereka dari kekuasaan politik. Kalangan oligarki lebih banyak memanfaatkan sumberdaya material untuk melancarkan usaha politik mereka. Dengan memanfaatkan situasi ketimpangan materi yang ada dalam lingkungan masyarakat, menjadi cara untuk memenangkan kontestasi politik. Apalagi jika kekuasaan material yang dimiliki oleh kaum oligarki juga didukung oleh mahalnya biaya politik dan tradisi budaya politik uang yang ada di masyarakat, semakin mudah untuk menggeser pesaing politik yang kurang memiliki sumber daya materi yang kuat.

Fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati menarik untuk diteliti karena, calon tunggal diusung oleh tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati. Di Kabupaten Pati terdapat 17 partai politik yaitu: PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, Golkar, PKS, Hanura, Nasdem, PPP, PAN, PBB, PKPI, Partai Berkarya, Partai Idaman, PSI, Perindo, dan Partai Garuda (Kesbangpol Jateng, n.d.). DPRD Kabupaten Pati terdapat 50 orang wakil rakyat, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Pati diantaranya yaitu: PDIP 8 kursi, Gerindra 9 kursi, PKB 7 kursi, Demokrat 8 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 5 kursi, Golkar 5 kursi, Hanura 4 kursi (DPRD Kabupaten Pati, 2019). Pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful diusung oleh 8 partai politik yaitu: PDIP, PKB, Gerindra, Demokrat, Hanura, Golkar, PKS, PPP. Partai politik yang memiliki kursi di DPRD namun tidak mendukung calon tunggal yaitu hanya partai Nasdem saja, sedangkan partai PPP tidak mendapatkan kursi di DPRD namun ikut dalam koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon Haryanto-Saiful.

Haryanto Melawan Kotak Kosong

Sebelum berlangsungnya pilkada Pati, banyak laporan mengenai maraknya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal dan menyebabkan panasnya situasi yang terjadi antara pendukung dari Haryanto dengan relawan yang mendukung kotak kosong. Bahkan ada gerakan masyarakat yang tidak menginginkan Haryanto untuk memimpin kembali Kabupaten Pati. Gerakan masyarakat ini tidak hanya melaporkan adanya kecurangan money politics yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal kepada Panwaslu saja melainkan juga mengajukan gugatan terkait kecurangan pada pilkada Pati kepada Mahkamah Konstitusi (Tribunnews, 2017).

Selain karena calon tunggal diusung oleh tujuh partai politik, fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati juga menarik untuk diteliti karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Hasil rekapitulasi pilkada Pati pasangan calon Haryanto-Saiful mendapatkan 519.675 suara, dari total 697.437 suara sah. Sementara kotak kosong mendapatkan suara sebanyak 177.762 suara. Namun, jika dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap Pati yang mencapai 1.034.256, tingkat partisipasi pemilih yang ada hanya 68,9% (Tribunnews, 2017).

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017.

Nama Pasangan Calon	Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon	H. Haryanto, SH, MM, M.Si Dan H. Saiful Arifin	Kolom Kosong	Jumlah Suara Sah Calon	Jumlah Suara Tidak Sah
Kecamatan	Batangan	24449	1846	26295	455
	Cluwak	24016	2554	26570	411
	Dukuhseti	26321	5933	32254	502
	Gabus	23503	8692	32195	714
	Gembong	20326	5238	25564	515
	Gunungwungkal	16189	4462	20651	421
	Jaken	25029	1510	26539	420
	Jakenan	19916	4746	24662	488
	Juwana	39919	13471	53390	1031
	Kayen	24157	11414	35571	1050
	Margorejo	23308	9964	33272	775
	Margoyoso	22639	16340	38979	908
	Pati	35067	23818	58885	1265
	Pucakwangi	23939	2894	26833	534
	Sukolilo	34121	9036	43157	1032
	Tambakromo	15358	121918	25518	1011
	Tayu	25861	10160	36525	770
	Tlogowungu	23775	10664	30198	604
	Trangkil	21709	6423	34103	706
	Wedarijaksa	22785	12394	34492	773
	Winong	27288	4559	31847	599
	Jumlah Akhir	519675	177762	697437	14984

Sumber: Arsip Data KPU Kabupaten Pati.

Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 hanya diikuti oleh satu pasangan calon. Pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful berhasil memenangkan pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, dengan mendapatkan suara sebanyak 519.675 suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 177.762 suara. Dengan hasil ini, Haryanto kembali terpilih sebagai Bupati Kabupaten Pati untuk periode ke-2, dengan masa jabatan tahun 2017 hingga tahun 2022.

Fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menjadi fenomena yang menarik, karena tingkat partisipasi pemilih dari masyarakat Kabupaten Pati, yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 cukup besar. Berikut ini tabel tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Pati, dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 berdasarkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Tabel 2. Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten Pati dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.¹

No	Kecamatan	Jumlah Pengguna Hak Pilih	Jumlah Pemilih Terdaftar dalam DPT	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih
1	Batangan	26750	33998	78,68%
2	Cluwak	26981	38161	70,70%
3	Dukuhseti	32756	47481	68,98%
4	Gabus	32909	51134	64,35%
5	Gembong	26079	37222	70,06%

¹ Ibid

6	Gunungwungkal	21072	30293	69,56%
7	Jaken	26959	37778	71,36%
8	Jakenan	25150	39398	63,83%
9	Juwana	54421	71085	76,55%
10	Kayen	36621	62892	58,22%
11	Margorejo	34047	46350	73,45%
12	Margoyoso	39887	57089	69,86%
13	Pati	60150	83823	71,75%
14	Pucakwangi	27367	39652	69,01%
15	Sukolilo	44189	70248	62,90%
16	Tambakromo	26529	44949	59,02%
17	Tayu	37295	54586	68,32%
18	Tlogowungu	30802	42502	72,47%
19	Trangkil	34809	48058	72,43%
20	Wedarijaksa	35202	48660	73,24%
21	Winong	32446	52101	62,27%
	Jumlah	712421	1037850	68,64%

Dari banyaknya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat yang menginginkan sosok pemimpin yang baru, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Pati seperti ini, sebetulnya sudah mencerminkan adanya demokrasi dalam pilkada yang diselenggarakan di Kabupaten Pati namun, kebenaran dari hal ini masih menjadi sebuah pertanyaan dan menjadi penelitian saya. Apakah benar masyarakat melakukan itu semua karena kehendak dari masyarakat, untuk melawan kecurangan yang ada, ataukahhanya merupakan settingan yang memang disusun dengan rapi oleh pihak tim sukses dari Haryanto, untuk menciptakan kondisi seolah-olah dalam Pilkada Pati demokrasi memang benar-benar hidup. Meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja tanpa adanya lawan yang menjadi penantang daripada Haryanto, selaku petahana dan didukung oleh hampir semua partai politik besar yang ada di Kabupaten Pati.

Meskipun demikian, tidak seharusnya hanya ada calon tunggal saja yang maju dalam pilkada. Dalam demokrasi yang hidup, seharusnya partai-partai politik lain mempunyai kader dari partai politik masing-masing, yang dapat diusung sebagai calon kepala daerah dari partai politik mereka. Namun situasi yang terjadi malah sebaliknya, tidak ada partai politik yang mencalonkan kader dari partai untuk menjadi penantang dari calon tunggal, bahkan partai-partai tersebut berkoalisi untuk memenangkan sang petahana. Jika dihitung-hitung dengan bergabungnya banyak partai besar dalam koalisi untuk memenangkan calon tunggal, secara otomatis seharusnya dapat dengan mudah untuk mengalahkan kotak kosong, sebab secara kuantitas semakin banyaknya partai politik yang mendukung maka semakin besar pula suara yang dapat diperoleh oleh calon tersebut. Hal ini justru mematikan demokrasi lokal yang ada sehingga, demokrasi lokal yang ada tidak mengenal adanya kompetisi yang sengit dalam demokrasi yang bertujuan untuk memilih calon pemimpin terpilih yang memang dicintai oleh masyarakatnya.

Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pati dalam menggunakan hak pilihnya, dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 cukup rendah, yaitu hanya 712.421 orang dari jumlah 1.037.850 orang atau

68,64% dari jumlah DPT. Fenomena calon tunggal di dalam Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menjadi menarik, karena tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Pati yang cukup rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Pati dalam menggunakan hak suaranya ini berkaitan dengan kasus Haryanto yang mengizinkan beroperasinya pabrik semen di wilayah bukit Kendeng. Masyarakat Pati menilai Haryanto lebih pro terhadap investor untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, daripada kepentingan masyarakat yang terdampak akibat beroperasinya pabrik semen.

Fenomena Calon Tunggal dalam Teori Hukum Besi Oligarki

Teori yang tepat untuk membahas mengenai fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati, yaitu menggunakan teori hukum besi oligarki yang dicetuskan oleh Robert Michels. Selain menggunakan teori hukum besi oligarki, untuk membahas mengenai fenomena calon tunggal di Kabupaten Pati, juga memerlukan tambahan dari adanya lobi-lobi politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal. Hal ini dapat dilihat dari tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati yaitu PDIP, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, Golkar, dan Hanura semuanya membentuk koalisi mengusung pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Asal-usul teori oligarki pada awalnya berasal dari teori elit dan kekuasaan dalam ilmu politik. Kata elit berasal dari bahasa latin yaitu *eligere* yang memiliki arti memilih yang dalam pengertian yang lebih luas yaitu sekelompok orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam suatu masyarakat (Keller, 1995). Kelompok Elit yaitu kelompok yang mempunyai kekuasaan dan dapat mengendalikan orang banyak jumlahnya sedikit. Teori elit ini kemudian dicetuskan oleh Pareto bahwa elit berada pada lapisan atas masyarakat dan terbagi menjadi dua bagian yaitu: elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah. Sedangkan masyarakat berada pada lapisan bawah dan berjumlah banyak atau disebut juga dengan non elit (Alfian, 2009).

Teori hukum besi oligarki merupakan kelanjutan dari teori elit, yang mana elit merupakan sekelompok kecil orang yang memiliki sumberdaya baik kekuasaan, maupun finansial yang melebihi banyak orang, sehingga timbul dominasi dari elit terhadap orang banyak. Dampaknya ialah distribusi kekuasaan di masyarakat tidak tersebar dengan rata, melainkan hanya dipegang oleh orang atau sekelompok orang yaitu elit, selanjutnya kalangan internal elit memiliki sifat yang sama, menyatu dan mempunyai kesadaran sebagai elit dan mengatur keberlangsungan kelompok mereka sebagai elit, sehingga kelompok elit merupakan kelompok yang otonom (Mas'ood & MacAndrew, 2006).

Lebih jauh saya akan berfokus tentang teori hukum besi oligarki dari Robert Michels dan kaitannya dalam partai politik. Dimulai pada tahun 1911 Robert Michels menulis bukunya yang berjudul *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen Uber die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens* membuat teori hukum besi oligarki (Lipset & Sanit, 1984). Dalam bukunya

tersebut Robert Michels mengatakan bahwa semua partai politik mempunyai kekuasaan yang sifatnya oligarkis yang berlandaskan dengan demokrasi. Sifat oligarkis dalam partai politik disebabkan oleh kebutuhan akan kepemimpinan dalam partai politik (New World Encyclopedia, n.d.).

Teori hukum besi oligarki dapat digunakan untuk melihat bagaimana keputusan dari DPP suatu partai politik memengaruhi terhadap calon yang akan diusung oleh partai politik tersebut, meskipun partai politik masih memiliki kader lain yang berkualitas. Hal ini seperti yang dialami oleh Budiono, mantan wakil bupati Kabupaten Pati yang telah mendaftarkan diri ke PDIP sebagai calon Bupati dalam pilkada Pati tahun 2017. Budiono ingin menggabungkan kekuatan PDIP dengan PKB karena Budiono merupakan seorang tokoh NU. Keinginan Budiono tidak terpenuhi karena DPP PDIP memutuskan untuk mengusung pasangan Haryanto-Saiful sebagai calon yang diusung oleh PDIP. Demikian juga yang terjadi pada PKB, PKB juga masuk kedalam koalisi partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful. Partai politik tidak hanya mencari kader yang berkualitas saja, partai politik juga mempertimbangkan popularitas dan kekuatan modal yang dimiliki oleh seorang calon, sebelum diusung oleh partai politik.

Selain menggunakan teori hukum besi oligarki, untuk mengamati fenomena calon tunggal memerlukan tambahan dari sudut pandang loby politik dan politik transaksional. Seperti yang terjadi pada fenomena calon tunggal pilkada Pati 2017, tujuh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD mengusung pasangan Haryanto-Saiful. Dibalik terbentuknya koalisi partai politik tersebut, tentunya ada loby politik dan politik transaksional yang dilakukan oleh elit dari partai politik untuk memenangkan pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 menggunakan hukum besi oligarki karena, keputusan terhadap siapa calon yang akan diusung oleh partai politik ditentukan oleh keputusan surat rekomendasi dari DPP Partai. Hal ini sesuai dengan asumsi dari teori hukum besi oligarkhi dari Robert Michels yang menyebutkan bahwa organisasi sedemokratis apapun pasti akan terdapat oligarki, termasuk dalam organisasi yang besar seperti partai politik. Oligarki muncul karena dalam sebuah organisasi memerlukan adanya kepemimpinan. Kepemimpinan dipegang oleh sekelompok orang timbul menjadi oligarkhi, karena adanya upaya untuk mempertahankan kekuasaan atau tetap berada di lingkaran kekuasaan. Dalam kasus fenomena calon tunggal pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2017, berkaitan dengan kekuasaan oligarki yang dipegang oleh DPP Partai. Tujuh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati, bersama membentuk koalisi memenangkan pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful.

Oligarki yang ada dalam DPP partai politik sulit untuk diganggu-gugat. Seperti yang pernah terjadi pada pilkada Kabupaten Pati tahun 2012. Pilkada Kabupaten Pati tahun 2012 diulang dua kali karena Sunarwi yang pada saat itu menjabat sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, tidak mengindahkan rekomendasi dari DPP PDIP dengan mendaftarkan dirinya sebagai calon Bupati Kabupaten Pati tahun 2012

yang diusung oleh PDIP. Hal ini berdampak dengan Sunarwi diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua DPC PDIP Kabupaten Pati, serta dikeluarkan dari PDIP. Tindakan Sunarwi ini telah menentang keputusan DPP PDIP yang merekomendasikan untuk mengusung Imam Suroso sebagai calon Bupati yang diusung oleh PDIP.

Hal ini sesuai dengan asumsi dari teori hukum besi oligarkhi Robert Michels, yang menyebutkan adanya kecenderungan dominasi oleh sekelompok kecil orang. Menurut Michels, oligarki muncul dalam empat dimensi politik, yaitu dari segi organisasi, oligarkhi dalam kepemimpinan, oligarki dalam konteks hubungan organisasi dengan rakyat dan oligarkhi dalam kekuasaan pemerintahan (Varma, 2003).

Partai politik mempunyai kekuatan oligarkis, kekuatan oligarkis tersebut akan terjadi juga dalam pemerintahan, hal ini tidak memerdulikan bagaimana partai politik mendapatkan kekuasaan, baik melalui pemilihan umum yang demokratis atau dengan cara penggulingan kekuasaan atau revolusi. Perbedaan antara oligarki dengan demokrasi ialah pada kepentingan yang ingin dicapai, dalam oligarki kepentingan yang ingin dicapai adalah kepentingan dari kelompok para pemegang kekuasaan, sementara dalam demokrasi, kepentingan yang ingin dicapai ialah kepentingan dari orang banyak, meskipun bukan konstituen yang dia wakili atau yang memilih dia sebagai wakil.

Dalam pemerintahan yang demokratis, walaupun kekuasaan dipegang oleh sedikit orang, namun tujuan yang ingin dicapai adalah kepentingan bersama. Hal inilah yang membedakan dengan oligarki, yang bertujuan untuk mendapatkan kepentingan sekelompok kecil orang yang berkuasa. Yang menjadi hal positif yang diperoleh dengan hidupnya demokrasi adalah fungsi partai politik sebagai tempat untuk menghimpun aspirasi dari rakyat, yang ditujukan kepada pemerintah menjadi tercapai (Budiarjo, 2003). Alasan yang kuat supaya partai politik berjalan sesuai fungsinya ialah asal mula terbentuknya partai politik disebabkan, karena demokrasi menuntut kekuatan rakyat dapat menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh negara secara langsung, agar sesuai dengan pilihan dari rakyat melalui perantara partai politik. Melalui ungkapan ini berarti rakyat merupakan golongan mayoritas orang yang menginginkan dipimpin oleh sekelompok kecil orang melalui sistem demokrasi.

Faktor yang menyebabkan hidupnya oligarki yaitu sebuah organisasi ataupun partai politik memiliki kebutuhan taktis maupun kebutuhan teknis yang harus dipenuhi oleh organisasi atau partai. Kebutuhan-kebutuhan ini mengharuskan partai politik dapat memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga partai politik terperangkap dalam hukum besi oligarki. Selanjutnya adalah, apabila partai politik sudah terperangkap kedalam hukum besi oligarki maka, partai politik tidak lagi mematuhi terhadap konstituennya, tetapi partai politik akan patuh terhadap elit yang menguasai partai politik sehingga, partai politik menjadi alat bagi golongan oligarkis partai dalam mempertahankan kekuasaan dan mencapai kepentingannya dan tidak lagi memperhatikan aspirasi rakyat.

Jika merujuk pada teori hukum besi oligarki dari Robert Michels yang menyatakan bahwa organisasi melahirkan dominasi oleh golongan terpilih atas pemilih, oleh pemegang mandat atas pemberi mandat, oleh utusan atas yang mengutus, barang siapa yang berbicara tentang organisasi ia juga berbicara tentang oligarki. Melihat pada fenomena oligarki saat ini, maka dapat dijumpai tidak hanya pada partai politik saja namun dalam skala yang lebih luas, oligarki dapat dijumpai dalam pemerintahan, militer, partai politik dan juga birokrasi yang mana kesemuanya memiliki struktur yang hierarkis atau terdapat elit yang memiliki kekuasaan yang mendominasi didalamnya.

Pro dan Kontra Mastarakat Pati terhadap Haryanto

Pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful menjadi satu-satunya pasangan calon yang maju dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Haryanto menuai pro dan kontra sebagai petahana, pasalnya pada periode pertama pemerintahan Haryanto sebagai Bupati Kabupaten Pati, Haryanto membuat kebijakan yang membuat sebagian masyarakat Pati menjadi tidak suka dengan Haryanto. Kebijakan tersebut ialah pemberian izin terhadap beroperasinya pabrik semen di wilayah Bukit Kendeng. Pemberian izin beroperasinya pabrik semen ini memberi dampak yang besar bagi masyarakat Pati, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Bukit Kendeng. Masyarakat banyak yang kehilangan tempat tinggal dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat beroperasinya pabrik semen.

Isu pabrik semen ini kemudian menjadi senjata bagi lawan politik Haryanto yaitu Budiono yang memiliki keinginan untuk maju dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Budiono tidak dapat mencalonkan diri karena tidak memenuhi persyaratan ambang batas minimum untuk mencalonkan diri. Kemudian muncul gerakan AKDPP yang merupakan boneka dari Budiono dengan misi memenangkan kotak kosong, akan tetapi masyarakat Pati banyak yang memilih untuk tidak memberikan hak suara mereka ke TPS. Hal ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Pati dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

Sementara masyarakat yang pro terhadap Haryanto sebagai calon tunggal, disebabkan karena Haryanto merupakan putra daerah Pati. Haryanto sejak kecil merupakan warga Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Pati tetap memilih Haryanto dan Haryanto memiliki lumbung suara di Dapil 3. Selain itu, sosok Haryanto juga dikenal oleh masyarakat Pati sebagai pemimpin yang peduloi terhadap rakyat kecil. Haryanto banyak memberikan santunan kepada rakyat kecil, salah satunya yaitu santunan kematian sebesar satu juta rupiah kepada setiap keluarga.

SIMPULAN

Haryanto menjadi sosok yang dapat menarik banyak partai politik untuk mengusung dia dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Partai-partai politik tersebut menjadi kendaraan politik bagi Haryanto

dalam memenangkan pilkada Kabupaten Pati tahun 2017. Partai koalisi pendukung Haryanto-Saiful merupakan hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati. Adanya koalisi gemuk dari partai politik pengusung Haryanto-Saiful menutup kemungkinan adanya calon lain yang muncul sebab kurangnya persyaratan yang dibutuhkan untuk mengusung calon dalam Pilkada. Persyaratan yang dibutuhkan dalam mengusung calon kepala daerah yaitu berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 40 ayat (1) yaitu: partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Dari persyaratan ini, jika melihat koalisi partai politik yang mengusung Haryanto-Saiful dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017 merupakan hal yang tidak mungkin memunculkan calon lain, karena hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Pati memilih untuk mengusung Haryanto-Saiful.

Koalisi delapan partai politik mengusung Haryanto-Saiful sebab Haryanto adalah seorang incumbent yang dianggap masih memiliki elektabilitas yang cukup tinggi di Pati. Selain karena faktor Haryanto merupakan seorang incumbent, Haryanto juga merupakan putra daerah Kecamatan Batangan sehingga warga Pati kemungkinan besar akan memilih Haryanto daripada kotak kosong. Faktor yang lain yang menjadikan partai-partai pendukung Haryanto mau menjadi kendaraan politik bagi Haryanto yaitu karena Haryanto mempunyai kekuatan finansial yang kuat juga partai-partai politik pendukung Haryanto menginginkan berada dalam pusaran kekuasaan apabila Haryanto-Saiful terpilih sebagai Bupati Kabupaten Pati tahun 2017-2022.

Membahas mengenai koalisi gemuk dari delapan partai pendukung Haryanto-Saiful, merupakan sebuah bentuk oligarki dari elit politik. Dengan terbentuknya koalisi gemuk tersebut, dan isinya adalah hampir semua partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Kabupaten Pati, hal ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan adanya calon lain untuk ikut maju dalam Pilkada. Timbulnya fenomena calon tunggal merupakan hasil dari adanya koalisi gemuk ini. Dari koalisi gemuk partai politik pengusung Haryanto-Saiful, terlihat bahwa partai-partai tersebut ingin tetap berada dalam pusaran kekuasaan apabila Haryanto-Saiful terpilih menjadi bupati Kabupaten Pati tahun 2017-2022. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Robert Michels mengenai hukum besi oligarki, dimana terjadi dominasi dari segolongan kecil orang terhadap orang banyak Segolongan kecil yang mendominasi disini adalah elit-elit dari koalisi partai politik pengusung Haryanto-Saiful terhadap orang banyak yaitu warga Pati. Elit-elit dari koalisi partai politik pengusung Haryanto-Saiful menjalin koalisi gemuk sehingga tidak memungkinkan adanya calon lain yang muncul lewat jalur partai politik. Ketidak mungkinan munculnya calon lain dari jalur partai politik terjadi sepertihalnya partai Nasdem yang tidak dapat mengusung Budiono dalam pilkada Kabupaten Pati 2017, karena kurangnya persyaratan jumlah kursi yang dibutuhkan untuk dapat mengusung calon. Hal ini juga

membatasi pilihan dari warga Pati untuk memilih pemimpin, karena hanya ada calon tunggal dalam Pilkada Pati tahun 2017.

Teori hukum besi oligarki yang dicetuskan oleh Robert Michels menyebutkan bahwa semua organisasi termasuk organisasi yang besar dan kompleks seperti partai politik, mempunyai kekuasaan yang bersifat oligarkis meskipun partai yang berideologikan demokratis sekalipun. Kekuasaan yang bersifat oligarkis ini menyebabkan kekuatan politik yang ada di pemerintahan berada di tangan sekelompok kecil orang dan mempunyai dampak yang besar bagi banyak orang.

Koalisi partai politik pengusung Haryanto-Saiful mau menjadi kendaraan politik bagi Haryanto-Saiful dengan tujuan agar mereka tetap berada dalam lingkup pusran kekuasaan dalam pemerintahan Haryanto. Kekuatan oligarkis yang terbentuk dari elit yang mendukung Haryanto-Saiful dapat membunuh pada demokrasi. Seperti halnya dalam pilkada Pati tahun 2017, dimana hanya terdapat calon tunggal saja yang mencalonkan diri dalam pilkada Pati tahun 2017 berakibat membatasi pilihan dari warga Pati, karena tidak ada pilihan lain kecuali calon tunggal atau kotak kosong. Disisi lain pasangan calon tunggal Haryanto-Saiful mendapatkan keuntungan politik dari adanya kekuatan oligarki dari elit-elit partai politik yang mengusung dirinya, keuntungan yang didapat oleh Haryanto selaku calon tunggal yaitu tidak ada pesaing bagi dirinya dalam pilkada Kabupaten Pati tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian MA (2009) Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Amirudin & Bisri AZ (2006) Pilkada Langsung: Problem dan Prospek. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arsip data KPU Kabupaten Pati.
- Budiardjo M (2003) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosanjoto P (2006) Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- DPRD Kabupaten Pati. (2019) Profil Anggota DPRD Periode 2014-2019. Diakses 29 Maret 2019, dari <https://dprd.patikab.go.id/page/profil-anggota-dprd-periode-2014-2019/25>
- Kesbangpol Jateng (n.d.) Diakses 29 Maret 2019, dari <https://kesbangpol.jatengprov.go.id>
- Martin L, Seymour, & Arbi S (1984) Robert Michels Partai Politik Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi. Jakarta: CV Rajawali.
- Mas'ood M & MacAndrew C (2006) Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- New World Encyclopedia (n.d.) Robert Michels. Diakses 31 Januari 2019, dari https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Robert_Michels
- Tribunnews (2017) Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Pati, Kotak Kosong Dipilih Lebih dari 170 Ribu Warga. Diakses 26 Januari 2019, dari <https://jateng.tribunnews.com/2017/02/23/ini-hasil-rekapitulasi-suara-pilkada-pati-kotak-kosong-dipilih-lebih-dari-170-ribu-warga>
- Tribunnews (2017) Mengejutkan, Ini Alasan Relawan Kotak Kosong Ajukan Gugatan ke MK terkait Hasil

Pilkada Pati. Diakses 26 November 2019, dari
<https://jateng.tribunnews.com/2017/03/16/mengejutkan-ini-alasan-relawan-kotak-kosong-ajukan-gugatan-ke-mk-terkait-hasil-pilkada-pati-2017>

Varma (2003) Teori Politik Modern. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.

DINAMIKA INTERAKSI ANTARA ELITE POLITIK LOKAL DAN ELITE AGAMA DALAM KONTESTASI PEMILIHAN PRESIDEN 2019 DI KOTA PASURUAN

Farid¹

¹ Departemen Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
farid-2014@fisip.unair.ac.id

Abstract: *The study focuses on the political phenomenon of the dynamic interaction between the local political elites and the religious elites in the contestation of the 2019 presidential elections. In this case of the contestation of presidential elections 2019, each has an influential elite in the community. The subject in this study to the political elites was a member of the Regional House of Representatives and Leaders of political parties in Pasuruan City. Furthermore, regarding the religious elites, it is a religious figure or religious leader who has an educational institution or a mass. The analysis study conducted is to use the main data obtained from an interview to the subject of the researcher and the secondary data information obtained from other supporting documents. The results of the research resulted in the findings of the Interaction dynamics between local political elites and religious elites in Pasuruan City during the 2019 Presidential Election. This interaction aims to win the candidate of the 2019 presidential spouse in Pasuruan city. Religious Elites and Local political elites in Pasuruan City each have the same interests. This interest is to win each of the spouses supported presidential candidates. The local political elites and religious elites are trying to win presidential candidates in a variety of ways. It starts with an open declaration until the indirect support. The religious elites in Pasuruan City have an important role in every election activity. Therefore, in the election activities will occur the dynamic interaction between the political elites and religious elites.*

Keywords: *Dynamics of interaction of local political elites, religious elites, 2019 presidential election.*

PENDAHULUAN

Pasuruan adalah kota yang dikenal dengan kota santri atau pesantren. Dimana kota pasuruan didominasi oleh masyarakat islam. Hal ini juga seirama dengan partai politik yang berkuasa di daerah tersebut, di mana partai PKB menjadi partai islam dengan basis masyarakat *nahdiyyin* yang berkuasa di wilayah tersebut. Partai PKB berkuasa dengan perolehan kursi yang mencapai 37% dengan jumlah kursi 11 dari total 30 kursi pada periode 2014-2019 (Kominfo, 2018). PKB dalam dunia politik di kota pasuruan mengambil peran sentral di kota pasuruan. Pendekatannya yang dilakukan adalah dengan mendekati tokoh agama atau ulama' yang ada di Kota Pasuruan. Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam peristiwa politik yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah jawa timur 2018. Dalam kasus ini PKB menjadi partai pengusung pasangan Gus Ipul pasangan Gus Ipul dan Putih untuk menjadi Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024.

Pendekatan yang dilakukan oleh partai PKB dengan menggandeng salah satu ulama' di Kota Pasuruan untuk memberikan maklumat dukungan kepada pasangan Gus Ipul. Adapun petikan maklumatnya adalah "semua alumni, warga santri putra dan putri salafiyah dan Bayt Al Hikmah harus tetap merapatkan dukungan kepada Drs H Saifullah Yusuf". Bentuk Petikan maklumat dukungan oleh KH Idris Hamid

Pasuruan adalah bagian dari cara sebagai elite agama yang mempunyai kekuasaan di tengah masyarakat (Connstantine, 2018).

Suzanne Keller menjelaskan dalam sebuah konsep tentang elite. Elite adalah suatu kelompok kecil masyarakat yang mendominasi dalam masyarakat itu sendiri. Kyai sebagai sosok elite yang mendominasi dan mempunyai kedudukan ditengah masyarakat. Bentuk keterlibatan kyai dalam dunia politik mempunyai beragam cara. Dimulai dengan terjun langsung dalam dunia politik hingga menjalin komunikasi komunikasi dengan elite politik yang hendak bertarung dalam kompetisi pemilu 2019. Fenomena politik ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti, apabila hal ini dikaji dalam Pilpres tahun 2019.

Fenomena dinamika interaksi antara elite politik lokal dan elite agama dimungkinkan terjadi dalam pilpres tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan peristiwa politik yang terjadi dalam pemilihan presiden tahun 2019. Dimana dalam pemilihan presiden tahun 2019 terjadi pertarungan antara sosok kyai yang terjun dalam politik secara langsung hingga tidak. Dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mempunyai latarbelakang sebagai mantan ketua MUI (Majelis Ulama' Indonesia). Sementara untuk pasangan Prabowo – Sandi tidak memiliki latar belakang sebagai kyai. Namun pasangan Prabowo – Sandi mendapatkan dukungan kuat dari Habaib dan Kyai yang tergabung dalam forum Ijtima' Ulama'.

Kota pasuruan sebelumnya dijelaskan sebagai kota santri dimana terdapat banyak ulama' dan kyai yang berada disana. Ulama' dan kyai di kota pasuruan memiliki pilihan tersendiri tentang sosok calon presiden dan wakil presiden yang hendak dipilih. Sementara itu elite politik lokal yang duduk di DPRD dan Walikota Kota Pasuruan juga didominasi oleh partai pengusung dari Jokowi-Ma'ruf amin. Dimana DPRD Kota Pasuruan pada tahun 2014-2019 berasal dari partai PKB dengan 10 kursi. Selanjutnya partai Golkar dengan 5 kursi serta urutan ketiga diisi oleh partai PDI-P. Dalam sisi eksekutif dimana walikota berasal dari partai Golkar dan PDI-P yang mendukung Jokowi-Ma'ruf (Kominfo, 2018). Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana dinamika interaksi antara elite politik lokal dan elite agama di Kota Pasuruan dalam kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019. Serta bagaimana elite politik lokal dan elite agama mempertahankan kepentingannya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Pasuruan.

Penelitian yang n digunakan dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptifSelanjutnya Fokus dalam penelitian ini adalah dinamika interaksi antara elite politik lokal dan elite agama dalam kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Pasuruan. Pokok substansial yang yang diteliti adalah variabel pola relasi antara elite politik lokal dengan elite agama dalam upaya memenangkan calon presiden tahun 2019. Serta Identifikasi terkait pengaruhnya di masyarakat dalam kontestasi Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Pasuruan.

Subjek penelitian yang dianalisis antara lain terdiri dari beberapa nasumber baik dari elite politik lokal dan tokoh agama pimpinan pondok pesantren di Kota Pasuruan. Sumber data dipilih dan menggunakan teknik wawancara bersifat *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiono 2016). Alasan menggunakan *purposive sampling* adalah karena tidak semua subjek penelitian memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu penulis memilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang menerapkan kriteria harus dipenuhi oleh subjek peneliti. Adapun subjek penelitian harus memenuhi salah satu kriteria dibawah ini sebagai berikut:

1. Elite agama yang mempunyai basis massa dan madrasah atau lembaga pendidikan di kota Pasuruan.
2. Elite politik lokal terdaftar menjadi anggota aktif partai politik, menduduki jabatan politik, dan mempunyai basis massa.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sesuai dengan tema penelitian. Serta tidak lupa alat perekam suara untuk merekam wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber. Peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk menganalisis data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka teoritik guna memberikan gambaran yang tepat pada fenomena yang diteliti. Analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata-kata yang sesuai dengan apa yang ada telah direkam dalam recorder tersebut.

Proses analisis data kualitatif yaitu dengan menghubungkan hasil temuan dengan referensi dan teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori. Kemudian hasil wawancara disusun untuk mengetahui kategori tertentu, atau pokok permasalahan tertentu yang menunjuk pada permasalahan penelitian. Selanjutnya akan dilakukan interpretasi deskriptif dengan mengacu pada landasan teoritik yang digunakan, didukung dengan data-data pelengkap, dan dibandingkan dulu hingga kini serta dengan hasil studi literatur untuk menjawab pola dinamika interaksi antara elite politik lokal dengan elite agama dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Pasuruan.

KERANGKA TEORETIK

Elite Politik dan Elite Politik Lokal

Elite politik menurut Suzanne Keller adalah sekelompok kecil atau orang yang mempunyai pengaruh atau kekuasaan dimasyarakat unyuk mengambil dan melaksanakan sebuah keputusan politik. Elite politik berasal dari kata elite atau bahasa latin *eligere* seorang pilihan yang mempunyai peranan penting dalam suatu kelompok masyarakat tertentu (keller, 1963). Elite politik lokal juga didefinisikan oleh Nurhasim, di mana elite politik lokal adalah elite yang berkuasa dalam struktur politik di tingkat lokal.

Penjelasan politik lokal adalah politik di level provinsi, kabupaten/ kota. Topik dan isu masalah yang dibahas dalam politik lokal berupa demokrasi, birokrasi, otonomi daerah, partisipasi warga, akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan teori ini maka pemimpin politik di level lokal tersebut dikenal sebagai sebutan elite politik lokal (Chalik, 2017).

Kekuasaan Elite Politik dan Elite Agama

Elite politik mempunyai kekuasaan yang kemudian dijelaskan oleh Robert Putnam. Robert Putnam seorang ilmuwan politik dari *Harvard University* yang membahas kekuasaan elite politik. Dalam penjelasan oleh Putnam kekuasaan digambarkan seperti piramida yang mempunyai tingkatan. Dimulai dari tingkat pertama pengambil keputusan hingga tingkatan kedua yang memiliki bentuk pengaruh, namun tidak dalam proses pengambilan keputusan. Tingkatan ketiga adalah masyarakat yang melaksanakan sebuah keputusan politik.

Steven Lukes sebagai ilmuwan politik juga menjelaskan tentang bentuk kekuasaan politik yang terdiri dari dua macam. Pertama adalah bentuk kekuasaan yang dapat dilihat dalam struktur formal pemerintah. Dalam hal ini seperti kekuasaan dalam eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kedua adalah bentuk kekuasaan tersembunyi atau *hidden power*. Kekuasaan tersembunyi merupakan kekuasaan yang tidak terlihat dalam sebuah struktur pemerintahan namun berimplikasi besar terhadap keputusan politik.

Elite agama adalah sosok yang memiliki kekuasaan dalam bentuk pengaruh dimasyarakat elite agama mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang berbeda dengan elite politik. Dimana elite agama kekuasaannya adalah *hidden power*. Kekuasaan seperti ini menjadikan kyai sebagai elite yang istimewa. Clifford Geertz adalah ilmuwan dari amerika serikat yang juga antropolog menjelaskan bentuk kekuasaan kyai dalam istilah *culture broker*. *culture broker* menjadikan kyai sebagai penghubung dalam nilai-nilai budaya yang ada sejak dahulu untuk di jelaskan kepada masyarakat. Clifford Geertz juga menjelaskan tentang jenis dari tipologi kyai yang kemudian terbagi menjadi 3 macam. Pertama sebagai kyai netral terhadap kegiatan politik dalam hal ini kyai ini masih berpartisipasi politik namun memilih untuk tidak menyerukan dukungan atau terjun langsung dalam politik. Selanjutnya adalah kyai yang masuk dalam kegiatan politik secara aktif. Kyai ini aktif dalam kegiatan politik praktis secara langsung. Terakhir adalah kyai yang tidak peduli dengan politik. Dalam hal ini kyai ini lebih memilih menghindar terhadap kegiatan politik (Suprayogo, 2009).

Miriam Budiarto juga menjelaskan kekuasaan elite dalam kekuasaan kebudayaan jawa. Dimana kekuasaan yang digunakan adalah behavioristis kekuasaan yang berdasarkan aspek lingkungan sekitar yang memiliki pengaruh. Dalam hal ini elite agama sebagai sosok yang mempunyai pengaruh di lingkungan masyarakat itu sendiri. Elite yang mempunyai kedudukan dimasyarakat adalah elite unggul. Elite ini akan mengtransformasikan kekuasaan ke masyarakat itu sendiri yang bersifat mengikat. Dimensi kekuasaan juga

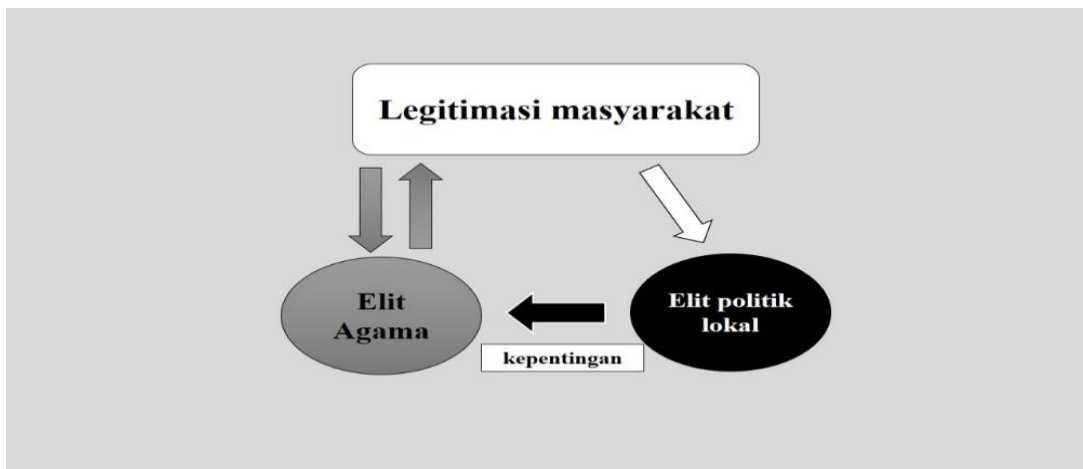
sangat terkait dengan modal yang digunakan. Modal ini berupa modal sosial dan modal ekonomi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi masyarakat.

PEMBAHASAN

Interaksi antara Elite Politik Lokal dan Elite Agama

Interaksi adalah bentuk komunikasi politik yang terjadi di antara elite agama dengan elite politik. Interaksi yang terjadi di kota Pasuruan pada umumnya dilakukan secara pribadi maupun secara struktural institusi. Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan di antara elite politik dan elite agama telah terjadi interaksi secara pribadi seperti yang dilakukan oleh H. Abdulah Junaedi dari partai PKB. Interaksi ini menurut beliau sudah lazim umum dilakukan makan sebelum atau sesudah Pemilu. Interaksi ini sudah menjadi warna dalam kegiatan pemilu oleh elite politik dan elite agama. Bentuk interaksi ini bertujuan menciptakan hubungan yang baik antara elite politik dengan elite agama. Elite dari partai PKB tersebut menjelaskan bahwa dirinya aktif menjalin komunikasi dengan beberapa tokoh agama di Kota Pasuruan.

Urgensi menjaga silaturahmi dalam interaksi secara pribadi sengaja diciptakan secara terus menerus untuk membangun relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Elite agama mempunyai peran penting dalam masyarakat karena mempunyai simpatisan dan basis massa yang besar. Elite politik lokal secara umum akan menjalin hubungan baik dengan elite agama yang ada di Kota Pasuruan. Hal ini tidak terlepas bagaimana elite politik yang harus memposisikan diri didalam masyarakat. Penulis menganalisis bahwa upaya yang dilakukan oleh elite politik lokal adalah untuk mendapatkan legitimasi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam gambar dibawah ini penulis menjelaskan berbagai bentuk kepentingan yang dilakukan oleh elite politik lokal kepada elite agama. Hal ini dilakukan mengingat elite agama mempunyai posisi yang penting dalam masyarakat.



Gambar 1. bagan interaksi antara elit politik lokal dan elite agama

Interaksi oleh elite politik lokal dengan elite agama mempunyai pengaruh dalam hasil pemilihan presiden 2019. Seperti contoh interaksi antara H. Abdullah Junaedi dengan KH Idris Hamid yang membawa dampak positif dengan hasil pemilu presiden 2019 di wilayah khususnya kediaman KH Idris Hamid dengan kemenangan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf. Selanjutnya untuk wilayah daerah pemilihan dari H. Abdullah Junaedi juga dimenangkan oleh pasangan Jokowi Ma'ruf yang sekaligus juga berdampak perolehan electoral suara di daerah pemilihan 3 atau Kecamatan Purworejo. Sehingga kemenangan hasil pilpres pasangan Jokowi Ma'ruf tidak terlepas adanya peran dari kedua tokoh tersebut baik H. Abdullah Junaedi dengan KH Idris Hamid.

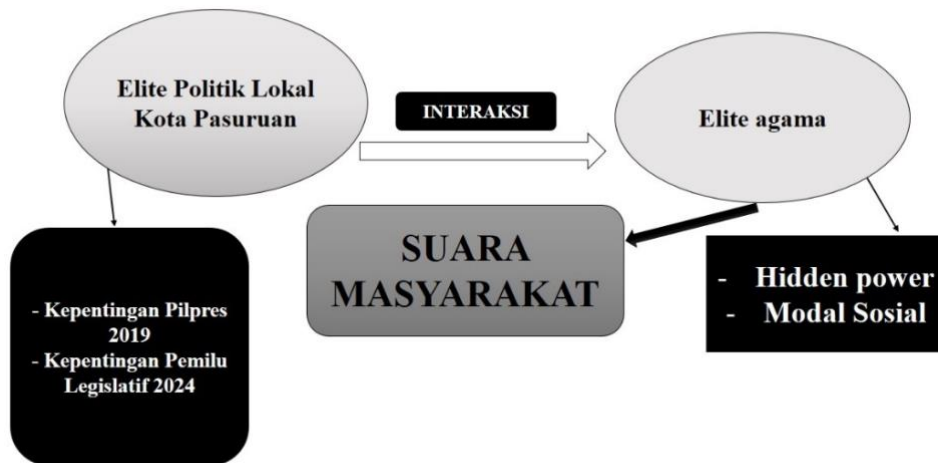
Interaksi Elite Politik dan Elite Agama Sebelum Pemilu

Interaksi politik oleh elite politik dan elite agama akan menjadi warna yang selalu menghiiasi serangkaian proses pemilu. Pemilu menjadi kulminasi untuk merebut kekuasaan secara legal dan sah. Pemilu yang melibatkan elite politik dalam upaya meyakinkan masyarakat untuk memilihnya kembali dalam pemilu. Dalam upaya untuk meyakinkan masyarakat tidak harus terjun kedalam masyarakat itu sendiri atau melalui simpatisan. Melainkan dengan cara elite politik menggunakan pendekatan kepada tokoh masyarakat yang memiliki massa yang cukup besar. Dalam pemilu tahun 2019 di Kota Pasuruan elite politik lokal intens melakukan pendekatan kepada elite agama. Sehingga dari pendekatan ini diharapkan elite agama membantu elite politik dalam proses pemenangan di pemilu tahun 2019 khususnya pemilu presiden.

Habib Taufiq Assegaf selaku tokoh agama dari kalangan umat islam menyebutkan hal yang sama tentang sebuah permintaan oleh elite politik untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu paslon tertentu di pemilihan Presiden tahun 2019. Namun dalam hal ini Habib Taufiq Assegaf menyampaikan bahwa hanya mendukung Muhammad SAW Rasulullah. Dalam hal lain Habib Taufiq Assegaf menyebutkan dalam berbagai macam tausiyahnya yang mengindikasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah adanya pendapat “jangan ikuti ulama’ yang menjadi peliharaan umaroh, namun ikutilah ulama’ yang berada diluar umaroh”. Berdasarkan ini menjadi isyarat tentang dukungan dan preferensi pilihan dari Habib Taufiq Assegaf dalam pemilihan presiden tahun 2019. Dalam hal ini Prabowo Subianto yang mendapatkan dukungan penuh dari Ijtima’ Ulama’ II. Fakta ini juga memberi dampak positif dengan suara Prabowo Subianto yang menang di kediaman Habib Taufiq Assegaf. Selain itu persentase kemenangan Jokowi di wilayah kecamatan kediaman Habib Taufiq Assegaf yang tipis.

Analisis yang dalam hal ini menunjukkan adanya peran Habib Taufiq Assegaf di wilayah tersebut. Hal ini mengingat Habib Taufiq Assegaf sebagai tokoh ulama' yang sangat disegani dan menjadi panutan masyarakat kota Pasuruan. Apabila perhitungan secara kalkulasi politik dimana Kecamatan Panggungrejo merupakan basis massa dari partai partai PKB dan Golkar berdasarkan hasil perolehan suara partai politik dari pemilu 2019, seharusnya Jokowi-Ma'ruf meraih suara lebih dari 80% di wilayah tersebut. Namun kehadiran Habib Taufiq Assegaf di wilayah itu serta beberapa statement tentang indikasi arah dukungan kepada salah satu calon presiden 2019 menjadi salah satu faktor dari 40% suara Prabowo-Sandi.

Kepentingan politik itu akan selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tidak terkecuali proses pemilu tersebut (Muhyidin, 2016). Steven Lukes yang menjelaskan tentang bentuk kekuasaan elite agama dalam *hidden power* sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki. Kekuasaan ini berpengaruh dalam masyarakat, namun kekuasaan tersebut tidak digunakan dalam sebuah penyelenggaraan negara atau institusi formal. gambar bagan dibawah ini akan menjadi gambaran tentang interaksi yang dilakukan oleh elite politik dan elite agama.



Gambar 2. Interaksi elit lokal dan agama sebelum pemilihan presiden

Kepentingan Elite Politik Lokal dan Elite Agama

Elite politik lokal kota Pasuruan mempunyai tugas dari partai untuk memenangkan proses pemilu tahun 2019. Berbagai macam manuver dilakukan oleh elite politik tersebut untuk memenangkan calon pilihan presiden tahun 2019. Pericles menjabarkan kepentingan sebagai bentuk keinginan. Kepentingan politik tentu akan selalu menghiasi dalam kehidupan dan berbangsa. Serta bentuk kepentingan politik tersebut tidak terlepas oleh elite politik itu sendiri.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan sebagian besar elite politik lokal memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan untuk mempengaruhi masyarakat. Persoalan yang

melatarbelakangi kepentingan elite politik lokal di Kota Pasuruan untuk memenangkan pemilihan presiden 2019. Pertama perintah partai politik kedua faktor adanya tokoh NU yang menjadi wakil presiden dan selanjutnya sejalan dengan visi dan misi. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Nawawi anggota DPRD Kota Pasuruan dari partai Nasdem. Sehingga penulis menggambarkan bentuk kepentingan dan latarbelakang kepentingan elite politik lokal dibawah ini.



Gambar 3. Kepentingan elite politik lokal

Latar belakang Kyai Ma'ruf amin yang menjadi tokoh NU atau Ra'is Am menjadi faktor utama kepentingan yang dilakukan oleh elite politik lokal kota pasuruan. Sebagian besar masyarakat Kota Pasuruan juga warga *nahdiyyin* atau warga NU. Pernyataan Muhammad Nawawi juga mempertegas sekaligus menjadi penegas faktor dukungan masyarakat kepada pasangan Jokowi Ma'ruf.

Kepentingan Elite Agama

Kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 tidak terlepas dari peranan elite agama. Elite agama menjadi sosok yang penting dalam menjaga perdamaian dan kesejukan di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan nilai nilai dan tranformasi dari agama yang dianut masing-masing. Miriam Budiarjo juga menjelaskan dalam dari kekuasaan tradisional jawa. Salah satu diantaranya elite agama memiliki modal sosial yang digunakan untuk mempengaruhi masyarakat. Modal sosial yang dimiliki didapatkan melalui proses yang lama dan panjang.

Keith R. Legg mencoba menjelaskan tentang kepentingan dan relasi kuasa oleh elite agama tentang patron klien. Elite agama sebagai patron yang mempunyai sebuah pengaruh dan power. Klien adalah pihak dari orang yang diperintah oleh patron atau masyarakat. Bentuk dari pola hubungan antara patron dan klien yang menunjukkan tidak ada hubungan yang horizontal atau setara. Elite agama di Kota Pasuruan mempunyai peran sebagai seorang patron dan masyarakat adalah klien (Legg, 1982). Hubungan interaksi ini didasarkan karena seorang patron mempunyai modal sosial ilmu dibidang agama dan kharisma. Sosok seperti Habib Taufiq Assegaf yang mempunyai massa dan begitu dicintai masyarakat. Hal ini juga di ikuti seperti Dwi Handono dari FKUB Kristiani yang mempunyai basis

massa di umat kristiani. Pola hubungan ini Nampak tidak setara mengingat dalam penjelasan Keith R. Legg.

Elite agama tersebut berkepentingan untuk masing-masing memenangkan pasangan calon presiden 2019 dengan caranya. Hal ini juga terkait banyak rantai kepentingan yang didasari seperti aspek ideologis, hingga permintaan elite politik. Sri Rejeki sebagai tokoh agama menyampaikan bahwa adanya permintaan dukungan oleh elite politik yakni salah satunya sutirta. selanjutnya Sri Rejeki juga menyampaikan tentang pentingnya memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf untuk melindungi eksistensi dari umat katolik tersebut. Sehingga kepentingan politik identitas menjadi salah satu penyebab Sri Rejeki memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Elite agama memiliki social learning sebagai modal utama dalam mempengaruhi masyarakat. Pola bentuk pemahaman agama terbuka terhadap lingkungan. Elita agama lebih atau kyai mempunyai pandangan sebagai simbol menjaga kesucian agama.

Kepentingan Elite Politik Lokal dan Elite Agama

Dinamika interaksi antara elite politik lokal dengan elite agama akan terus terjadi di dalam politik di kota Pasuruan. Setiap elite politik memiliki kepentingan tersendiri dalam pilpres tahun 2019. Keterlibatan kyai dalam politik tidak terlepas dari kesadaran mereka sebagai penyandang peran-peran sosial. Kyai memandang bahwa dirinya sebagai ulama atau pewaris nabi berkewajiban melibatkan diri pada persoalan umat yang membedakan diantara peran umaroh. Sedangkan umaroh memberikan makna partai politik dan pejabat pemerintahan berbeda. Terdapat kewenangan yang berbeda antara ulama dan umaroh. Ulama bertugas memberikan pelayanan berkaitan dengan agama dan umaroh pemerintah berwenang mengurus pemerintahan. Kedua bidang ini harus berkedudukan secara terpisah dan berfungsi saling melengkapi. Dalam konstelasi pemilihan presiden 2019 masing-masing elite politik dan elite agama akan berkompetisi untuk mempertahankan kepentingannya. Seperti dalam penjelasan dibawah ini oleh salah satu elite agama di kota Pasuruan yakni Hasjim As'ari.

Hasjim Asy'ari selaku ketua DPD Nasdem kota Pasuruan menyampaikan tentang bentuk kepentingan politik kaitanya dengan pemilu presiden 2019. Bahwa polarisasi yang terjadi di ini disebabkan elite agama yang masuk ke dalam dunia politik praktis. Menurut Hasjim Asy'ari bahwa hal ini akan merugikan dari tokoh agama tersebut karena menurut Hasjim Asy'ari situasi yang ada di nasional berbeda dengan yang terjadi di oleh persebaran media sosial Hasjim Asy'ari berpendapat kebanyakan dari tokoh agama termakan oleh berita hoax yang ada di media sosial.

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan adanya bentuk persaingan kepentingan antara elite politik dan elite agama. Karena di Pasuruan elite agama tidak semuanya mendukung sesuai dengan pilihan elite politik tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis adanya konflik yang terjadi dengan saling melempar statement. Akan tetapi, secara umum antara elite politik lokal dan elite agama mempunyai kepentingan masing-masing. Seperti kepentingan dari elite politik lokal adalah berupaya memenangkan calon presiden tahun 2019 sesuai dengan arahan dari partainya. Sedangkan kepentingan

utama dari elite agama adalah menjaga kedamaian kondusivitas di tengah masyarakat. Namun elite agama juga mempunyai kepentingan lain untuk memenangkan pasangan calon presiden 2019 demi eksistensi dirinya. Dinamika antara elite politik lokal dan elite agama yang terlihat di Kota Pasuruan disebabkan beberapa faktor di antaranya:

1. Adanya perbedaan preferensi dukungan diantara elite politik lokal dan elite agama yang terjadi di Kota Pasuruan.
2. Adanya afiliasi politik yang tidak terlihat antara elite politik lokal dan elite agama.
3. Diantara elite agama dan elite politik mereka secara umum tidak terikat satu sama lain. Namun mereka ada yang mempunyai keterikatan seperti H. Abdullah Junaedi dengan tokoh kyai NU seperti KH Abdul Khalim.

Kyai hingga saat ini tetap memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Harapan Kyai dan pandangan masyarakat dalam memandang posisi ulama kyai selalu menekankan tanggung jawab dirinya untuk memimpin masyarakat agar tidak tersesat dalam mengarungi hidup sementara masyarakat meletakkan kyai sebagai figur yang harus diteladani agar hidupnya sesuai dengan tuntutan agama.

Tingkat kepatuhan terhadap kyai ini tentu sebanding dengan karakter santri masyarakat. Dimana kyai menjadi satu-satunya rujukan ketaatan yang bersifat mutlak. Dinamika interaksi antara elit politik lokal dan elit agama dalam hal ini menjadi pertarungan yang tidak akan ada habisnya. Mengingat *culture* yang selalu menghiasi dan dipertahankan hingga sampai saat ini di Kota Pasuruan adalah *culture* pesantren dan kyai sebagai elite agama memanfaatkan posisi tersebut. Akan tetapi tidak semua elite agama menggunakan posisi tersebut untuk kepentingan pragmatis mereka.

Peranan dari elite agama dalam pilpres tahun 2019 sangat mempengaruhi preferensi pilihan politik masyarakat Kota Pasuruan. Hasil pemilu presiden 2019 dimana seharusnya Jokowi-Ma'ruf dengan kekuatan partai politik yang kuat di Pasuruan hanya mampu menang diangka 55 % suara. Tentu hal ini juga tidak terlepas dari elite agama yang mempunyai dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto yang salah satunya adalah Habib Taufiq Assegaf. Modal sosial yang dimiliki oleh Habib Taufiq Assegaf ini juga berperan sangat signifikan terhadap hasil di setiap kecamatan di Kota Pasuruan. Pasangan Jokowi Ma'ruf tidak mampu menang 70% suara di setiap kecamatan. Sehingga sosok Habib Taufiq Assegaf pengaruhnya tidak hanya di wilayah kecamatan kediamannya melainkan di seluruh Kota Pasuruan.

SIMPULAN

Kontestasi pemilihann presiden tahun 2019 di Kota Pasuruan melahirkan sebuah kompetisi diantara elite politik dengan elite agama. Pasangan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul di Kota Pasuruan. Hal ini disebabkan kekuatan partai politik yang mendominasi di Kota Pasuruan berasal dari partai pengusung Jokowi-Ma'ruf. Kedua sebagian elite agama memberikan dukungan penuh kepada pasangan Jokowi Ma'ruf. Seperti kumpulan ulama' dan kyai Nahdatul ulama' pasuruan yang di pimpin oleh KH

Idris Hamid. Namun disisi lain terdapat pandangan yang berbeda dengan bentuk dukungan secara tidak langsung kepada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dukungan ini juga diberikan oleh salah satu elite agama di Kota Pasuruan, yakni Habib Taufiq Assegaf. Sehingga ditemukan di lapangan perolehan suara dari Prabowo Subianto –Sandiaga Uno mampu menyaingi pasangan Jokowi Ma'ruf dengan selisih 5% suara. Dukungan tidak langsung yang diberikan Habib Taufiq Assegaf ini dapat dilihat tentang penyampaian kegiatan ceramah yang mengindikasikan arah dukungan kepada pasangan Prabowo. Interaksi antara elite politik lokal dan elit agama terjadi dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Pasuruan. Interaksi ini berwujud sebuah permintaan dari elite politik kepada elite agama untuk menyerukan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden tahun 2019.

Kepentingan elite politik lokal dan elite agama dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019 saling beriringan dan terdapat yang berbeda. Elite agama yang berseiringan untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf mempertahankan kepentingannya dengan mendukung secara langsung dan deklarasi terbuka. Sedangkan elite agama yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga mendukung dengan cara tidak langsung. Selain itu hasil ini menggambarkan bahwa elite agama masih mempunyai peranan kuat di tengah masyarakat Kota Pasuruan, sehingga preferensi dukungan kyai di Kota Pasuruan menjadi salah satu hal penting dalam pemilihan presiden 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo M (1984) *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Connstantine B (2018) Kiai Idris Hamid Keluarkan Maklumat terkait Pemilihan Gubernur Jatim Mendatang. *Surya*, 6 Juni 2018. Diakses 13 Mei 2019, dari <https://www.google.com/amp/s/surabaya.tribunnews.com/amp/2018/06/06/Kiai-Idris-Hamid-Keluarkan-Maklumat-Terkait-Pemilihan-Gubernur-Jatim-Mendatang/>
- Harrison L (2007) *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Preneda Media Grup.
- Keller S (1963) *Penguasa dan Kelompok Elite*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kominfo (2018) Sejarah Kota Pasuruan. Diakses 18 Mei 2019, dari <https://pasuruankota.go.id/sejarah-pasuruan/>
- Legg KR (1982) *Tuan, Hamba, dan Politisi*. Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Muhyidin A (2016) Aktor politik dan kepentingan. *Jurnal Politik*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.86>
- Nurhasim M (2005) *Konflik antar Elite Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Rahma M (2019) Putra Kyai Hamid Pasuruan Serukan Pilih Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. *Warta Bromo*, 25 Maret 2019. Diakses 3 April 2019, dari <https://www.wartabromo.com/2019/03/25/gus-idris-serukan-pilih-Jokowi-maruf-pada-pilpres-2019/>
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabhet.
- Suprayogo I (2009) *Kyai dan Politik (Membaca Citra Politik Kyai)*. Malang: UIN-Maliki Press.

PERSPEKTIF *POLITICAL JUSTICE* DI DALAM IMPLEMENTASI BPJS PBI DI KOTA SURABAYA

Tamy Nur Nabilah¹

¹*Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
tamynurnabb@gmail.com*

Abstract: *This study discusses the perspective of Political Justice in the Implementation of BPJS PBI in Surabaya. The study aims to determine the implementation of BPJS PBI in Surabaya has fulfilled Political Justice and the implementation of BPJS PBI in Surabaya is adequate as a form of political justice. The research method that uses is descriptive qualitative because it presents a detailed description of the situation or social phenomenon. Methods of data collection using direct interviews with resource persons include: Head of Surabaya City Health Office, Surabaya City DPRD Commission D, Lurah, BPJS recipient community. The results showed that the implementation of BPJS PBI in Surabaya City had not yet fulfilled Political Justice, based on indicators of fairness, equality, equality, and impartiality. The implementation of BPJS PBI in the city of Surabaya is also inadequate as a form of political justice because the state still determines justice in terms of profit and loss to health because the way of thinking lies in the amount of current contributions that do not match the actual calculation. Therefore, the implementation of the Health Insurance for the Poor program funded by the Surabaya City Regional Budget has not yet fulfilled the concept of Political Justice. This can be seen that there are still Health Insurance recipients who are not on target because of lack of accuracy in the process of verifying data on the poor in Surabaya, easy to get a Poor Certificate (SKM) that applies only once, and there are still groups of welfare recipients, so there is no meet the aspects of equity and justice.*

Keywords: *Political justice, politics of health, implementation policy.*

PENDAHULUAN

Negara sesuai amanat UUD 1945 pada asas dasarnya dibentuk untuk memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi rakyatnya (*welfare state*) (Cahyandari *et al.*, 2015). Salah satu konsep *welfare state* yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat dilihat pasal 28H ayat (1) dan (3) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk melakukan hal tersebut, Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara harus mengembangkan sistem jaminan sosial (Putri, 2014).

Salah satu program di Indonesia untuk menghadirkan prinsip kesejahteraan sosial dan perwujudan jaminan sosial adalah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), selanjutnya disebut UU BPJS, BPJS merupakan badan hukum dengan tujuan yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Salah satu jenis BPJS adalah BPJS Kesehatan yang dibentuk sebagai perlindungan sosial untuk menjamin kesehatan masyarakat terjamin dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang lebih baik dan layak (Vyandri, 2016). Dasar asas yang digunakan oleh BPJS dalam menyelenggarakan sistem jaminan

kesehatan nasional merupakan sistem yang berpedoman pada asas kemanusiaan, dengan manfaat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (BPJS Kesehatan, 2018).

Faktanya, seperti yang dikutip dalam Cahyandari *et al.* (2016), dalam pengimplementasian terlihat BPJS kesehatan belum siap menjalankan tugas dan wewenangnya sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan bagi semua pihak terkait dan terdapat pemaksaan oleh negara untuk seluruh rakyat sebagai peserta BPJS dalam implementasi BPJS kesehatan.

Menurut Basuki, *et al.* (2016), aktor kebijakan sebagai faktor penting keberhasilan suatu kebijakan. Aktor penting pelaksanaan program kebijakan JKN adalah pemerintah sebagai instrumen langsung dari negara. Pemerintah idealnya berupaya memberikan keadilan politik (*political justice*) yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Hasil penelitian Salim & Dartanto (2013) mengungkapkan bahwa program PBI bagi masyarakat kurang mampu perlu keterlibatan pengawasan ketat oleh aktor kebijakan karena dinilai kurang sejalan dengan prinsip gotong royong (iuran). Hal ini karena masih ada celah bagi yang mampu turut serta dalam kepesertaan program PBI.

Teori keadilan yang dirumuskan John Rawls mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Ini seharusnya menjadi prinsip bagi institusi-institusi sosial bila ingin mewujudkan keadilan sosial (Anggara, 2013). William Godwin melalui teori *political justice* memberikan kritik radikal terhadap institusi pemerintah yang tidak adil. Dengan kata lain, keadilan harus bertujuan menghasilkan pemerataan dan kesetaraan, serta ketidakberpihakan (Godwin, 1793). Oleh karena itu, keadilan politik sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. Keadilan politik merupakan keadilan yang murni, mendetail dan netral, tidak timpang karena kepentingan kelompok atau pun kelas-kelas. Keadilan politik dikenal secara konseptual adalah memiliki makna dasar "sama". Dengan demikian, Keadilan politik mengandung arti memelihara hak-hak individu dan memberi hak-hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Sebaliknya, ketidakadilan politik adalah kesewenang-wenangan suatu Lembaga Negara yang diselewengkan oleh para aktor politik yang berdampak pada masyarakat luas (Fisk, 1989).

Keadilan politik dalam penelitian ini mengacu pengertian keadilan yang diutarakan John Rawls mengenai keadilan itu *fairness* bahwa setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi dan Godwin menyatakan keadilan harus bertujuan menghasilkan pemerataan dan kesetaraan, serta ketidakberpihakan.

Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif deskriptif dengan meneliti permasalahan yang tengah terjadi di masyarakat yang kemudian dijelaskan secara detail sesuai dengan hasil temuan data yang telah diperoleh. Fokus dari penelitian ini Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya dalam Perspektif *Political Justice*. Data yang didapatkan melalui hasil wawancara mendalam yang telah dikelompokkan dan dianalisis agar dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dengan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjelaskan secara detail mengenai implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya

apakah sudah memenuhi *Political Justice* dan implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya apakah sudah memadai sebagai bentuk *political justice*.

Dalam lingkup di Surabaya, hasil pengamatan ditemukan bahwa implementasi kebijakan BPJS Kesehatan anggota PBI di Surabaya menunjukkan sosialisasi masih lemah terutama pada awal implementasi karena sering terjadi penolakan dan adanya ketidaktahuan. Tetapi dorongan untuk menkover masyarakat miskin dengan jaminan kesehatan telah berjalan dengan baik, sehingga penerapan model implementasi kebijakan dalam program BPJS Kesehatan untuk PBI di Surabaya perlu ditambahkan faktor lingkungan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Dengan gambaran tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah yang optimal diharapkan memberikan dampak pada aktor pelaksana lainnya seperti lembaga BPJS Kesehatan, rumah sakit, pihak swasta, dan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengkaji peran negara dalam menghantarkan BPJS sebagai bagian dari kebijakan politik yang berdimensi keadilan di bidang kesehatan. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, BPJS sebagai bagian dari proyek keadilan sosial di bidang kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam hal ini kota Surabaya. Berbagai masalah dan kendala BPJS akan dikaji melalui temuan data terutama terkait kontribusi pemerintah kota Surabaya dalam mewujudkan keadilan politik (*political justice*). Dengan melihat BPJS dari perspektif *political justice*, dapat menambah pengetahuan kita akan makna dari sebuah kebijakan itu harus adil dan berdampak luas. Selain itu juga peneliti berharap perspektif *political justice* ini membuat kita mengetahui seperti apa keadilan pada program yang salah satunya sangat dibanggakan oleh walikota Surabaya.

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya Belum Memenuhi *Political Justice*

Political justice merupakan konsep keadilan politik yang diperoleh setiap warga negara. Politik hubungannya dengan keadilan, memiliki keterikatan antara satu sama lainnya. Keseimbangan dalam politik bisa tercipta jika keadilan menjadi roh dalam setiap kebijakan politik. Indikator untuk mengukur *political justice* mengacu pada teori keadilan yang diutarakan John Rawls dan Godwin yaitu prinsip *fairness*, pemerataan, kesetaraan, dan ketidakberpihakan.

Secara prinsip konteks *fairness*, implementasi BPJS PBI Kota Surabaya belum memberikan rasa keadilan bagi warga Surabaya. Terbukti masih banyak warga yang diduga telah sejahtera menerima BPJS PBI. Secara prinsip pemerataan juga masih belum merata dari baik dari segi pelayanan, pendistribusian, maupun penetapan tarif, hal ini disebabkan minimnya rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS yang tidak berimbang dengan jumlah peserta PBI, *fee* dokter yang tidak lancar membuat penanganan menjadi terhambat, dan lain-lain. Secara prinsip kesetaraan dinilai implementasi BPJS PBI Kota Surabaya masih belum memenuhi prinsip tersebut karena masih ada ketidakseimbangan pembagian penerima bantuan iuran (PBI). Secara ketidakberpihakan juga implementasi BPJS PBI Kota Surabaya masih dinilai syarat keberpihakan, hal ini terjadi pada perlakuan pelayanan penanganan pasien berdasarkan kelas.

Dari data lapangan dan analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *political justice*. John Rawls dalam konsep keadilan seperti menggunakan *mind game*. Adalah rasional misalnya, bagi seorang yang kaya-raya untuk menentang usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Namun demikian sebaliknya, untuk seorang yang miskin, adalah rasional bagi dirinya mendukung usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dan akan berpendapat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pertanyaannya, kebijakan manakah yang akan diambil oleh pemerintah? Kebijakan manakah yang paling adil? Sebagai jawaban atas pertanyaan seperti ini, Rawls menyuguhkan jawaban dengan menggunakan dua kondisi imajiner yang menghasilkan satu *rule*; *Original Position*, *Veil of Ignorance* dan *Maximin Rule* (Anggara, 2013).

Original Position atau posisi awal adalah sebuah kondisi imajiner di mana setiap orang berada dalam keadaan awal yang sifatnya setara. Diasumsikan bahwa dalam keadaan awal ini semua orang memiliki hak dan akses yang sama untuk memilih prinsip yang akan diterapkan apabila dikembalikan kepada kenyataan nantinya. *Original Position* ini berguna dalam membuat kebijakan publik, atau misalnya konstitusi. Dalam membuat konstitusi hams diumpamakan bahwa masyarakat pada saat konstitusi itu belum dibuat, berada dalam keadaan *in natura*, dalam kondisi setara, tanpa kelas dan tanpa hierarki. Dalam pandangan ini dari segi BPJS PBI, pemerintah kota Surabaya khususnya melihat kebutuhan kesehatan sebagai kebutuhan yang harus disokong oleh pemerintah kota, maka dari itu dana APBD untuk kesehatan alokasinya sangat besar. Orang-orang yang berada dalam *Original Position* ini kemudian diasumsikan berada di belakang *veil of ignorance*. Dalam hal pembuatan konstitusi misalnya, diasumsikan tidak tahu, bahwa setelah dikembalikan kepada kenyataan akan menjadi turunan ningrat, orang berkulit putih, anggota suku terpencil, industrialis kaya, buruh atau orang kulit hitam. Mereka tidak tahu tingkat intelektualitas mereka nantinya, kekuatan, kesehatan dan hal-hal sejenisnya. Karena, apabila mereka tahu bagaimana nantinya status dan peranan mereka dalam kehidupan kemasyarakatan, maka dalam membuat klausul konstitusi mereka akan cenderung berpihak pada kepentingannya. Yang nantinya menjadi industrialis ingin agar upah buruh murah, yang nantinya ditakdirkan menjadi buruh ingin gaji yang paling tinggi dan banyak libur. Dengan *Veil of ignorance*, masyarakat tidak tahu posisi mereka dalam kenyataan. *Veil of ignorance* ini penting supaya konstitusi, hukum atau kebijakan publik lainnya yang dihasilkan nantinya berlaku adil bagi setiap anggota masyarakat karena mereka semua dalam *Original Position* memiliki kesetaraan dan tidak bisa melihat kepada kenyataan karena dihalangi oleh *Veil of Ignorance* maka pengambilan keputusan yang paling rasional bagi para pihak adalah keputusan Maximin (*Maximum Minorum*), mengambil keputusan yang paling maksimal dari pilihan minimal. Rawls membatasi keadilan sebagai "*fairness*", dengan mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung (Anggara, 2013). Merefleksikan dari pendapat Rawls, sisi BPJS PBI ini memelihara masyarakat yang kurang beruntung namun sisi kesetaraan dalam implementasi ini tidak ada, karena di kota Surabaya sendiri adanya beberapa kelompok masyarakat yang menerima BPJS PBI secara cuma-cuma tanpa perlu daftar.

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya Belum Memadai Sebagai Bentuk *Political Justice*

“Ora Trimo dibantu ta piye, aku iki ditolak mlebu IGD soale ra gowo rujukan, nah keadaan panik opo isok mbak sek sempet jauh rujukan, yo pada akhire aku ditolong ambek dokter kono tapi staff’e sik eling aku kata-katae” (Mutmainah)

Berdasarkan temuan diketahui bahwa pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya belum memadai sebagai bentuk *Political Justice*. Hal ini terlihat bahwa penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya. Selain itu, mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali pakai atau menurut perwali selama satu bulan tanpa ada tindak lanjut pendataan atau integrasi Data Kemiskinan antara Bappemas dengan kelurahan di Kota Surabaya. Hal ini tidak berkaitan isi kebijakan namun terletak pada pelaksanaan kebijakan. Implementasi program PBI BPJS belum memenuhi *political justice* juga akibat masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan. Contohnya saja dapat kita lihat di salah satu Perwali yakni Perwali nomor 61 tahun 2015. Yang dimana Perwali itu mengatur dan memutuskan beberapa pihak kelompok masyarakat yang terjamin langsung dari peraturan itu mendapatkan BPJS PBI. Kelompok masyarakatnya diantara lainnya yakni : Kelompok Bunda Paud, Kelompok Kader KB, Kelompok Kader Jentik dan sebagainya. Dan dari penelitian yang saya lakukan, rerata masyarakat yang tergabung ke kelompok masyarakat tersebut adalah masyarakat golongan ibu-ibu yang dimana ekonominya berkecukupan. Disini saya melihat sisi masyarakat yang kurang mampu dimana dirinya sendiri jika untuk mendaftar dipersulit maupun untuk gabung pada kelompok masyarakat juga tidak memiliki aksesnya pun.

Menurut Plato yang dikutip dalam Nasution (2014:120) munculnya negara karena adanya hubungan timbal balik dan saling membutuhkan antara sesama manusia. Plato juga mengatakan bahwa, negara ideal menganut prinsip mementingkan kebajikan (*virtue*). Begitu pentingnya prinsip kebajikan, hingga Plato beranggapan bahwa negara yang terbaik bagi manusia adalah negara yang penuh dengan kebajikan (keadilan) di dalamnya. Teori keadilan menurut Plato menekankan pada harmoni atau keselarasan. Bagi Plato keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum. Baginya keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan Undang-undang perlu dibuat.

Di sisi lain Gostin menggunakan istilah keadilan substantif* dalam hal pemenuhan kesehatan. Menurut Gostin, keadilan substantif dalam masalah kesehatan berkenaan dengan “*the just distribution of health benefit and burdens*”. Maksudnya penerapan konsep keadilan substantif adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus

dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan. Ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu. Dari situ menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan atau jatah bagian (Kurnia, 2013).

Berdasarkan konstruksi konsep keadilan Aristoteles keadilan distributif* merupakan tugas dari pemerintah kepada warganya untuk menentukan apa yang dapat dituntut oleh warga negara dalam negaranya. Konstruksi keadilan yang demikian ini membebaskan kewajiban bagi pembentuk Undang-undang untuk memperhatikannya dalam merumuskan konsep keadilan ke dalam suatu Undang-undang (Kurnia, 2013).

Secara teoretis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai objektivitas. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir (Nasution, 2014:121-122). Berdasarkan hal ini bagi kaum liberal keadilan dipahami sebagai suatu ketertiban rasional yang di dalamnya hukum alamiah ditaati dan sifat dasar manusia diwujudkan. Berbeda dengan kaum liberal, penganut utilitarianisme* menolak digunakannya ide hukum alam dan suara akal dalam teorinya. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia.

Konsep keadilan pada jaman modern diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal (Nasution, 2014:122). Bagi penentang utilitarian, keadilan menolak argumen yang menyatakan bahwa hilangnya kebebasan sebagian orang dapat dibenarkan atas asas manfaat yang lebih besar yang dinikmati oleh orang-orang lain. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang adil, kebebasan warganegara yang sederajat tetap tidak berubah, hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik ataupun pada pertimbangan kepentingan sosial (Nasution, 2014:120). Maka dari itu disisi ini program BPJS PBI yang terpusat ini diharapkan juga dicontoh dan diperluas di daerah lain seperti halnya kota Surabaya. Karena kesehatan itu sendiri juga pada dasarnya sebagai aspek dasar dalam hidup yang berkeadilan.

Berdasarkan sekian banyak pengertian dan teori-teori yang dikemukakan para ahli, pada umumnya menyangkut mengenai hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Berbagai definisi keadilan di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan

merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam kaitannya implementasi BPJS PBI Kesehatan Kota Surabaya, keadilan harus berprinsip adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral dan benar secara moral sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan bagi warganya. Dengan demikian, peran aktor sangat sentral dalam keberhasilan implementasi BPJS PBI, baik dalam perumusan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan.

SIMPULAN

Implementasi BPJS PBI di Kota Surabaya belum memenuhi *Political Justice*. Hal ini terlihat dari beberapa indikator *Political Justice* meliputi *fairness*: belum memberikan rasa keadilan; pemerataan: masih belum merata dari baik dari segi pelayanan, pendistribusian, maupun penetapan tarif; kesetaraan: masih belum setara dalam pendistribusian peserta PBI; dan ketidakberpihakan: masih tebang pilih dalam penanganan peserta PBI sesuai kelasnya. Peran aktor kebijakan dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya menjadi kekuatan yang harus menegakkan hukum untuk keadilan melalui kebijakan yang dibuat dan mekanisme implementasi kebijakan.

Anggaran juga menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan serta disposisi kebijakan. Dukungan dan kemauan yang kuat dari pihak pelaksana kebijakan dapat memperlancar implementasi kebijakan. Seperti dukungan pihak kelurahan yang profesional. Namun masalah pemerataan penerima BPJS PBI masih belum optimal serta pelayanan mungkin kurang, seperti susah mencari fasilitas kesehatan yang 24 jam. Persoalan rujukan, juga masih terlalu rumit. Sementara peserta PBI mendapatkan hak yang sama untuk bisa berobat ketika sedang sakit. Perbedaannya hanya pada kamar perawatannya saja. Peserta PBI masuk ke dalam golongan kelas 3 dengan ruang perawatan paling bawah, sedangkan untuk obat dan pertanggung jawaban sama.

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibiayai APBD Kota Surabaya terlihat belum memenuhi konsep *Political Justice*. *Pertama*, penerima Jaminan Kesehatan masih ada yang tidak tepat sasaran karena kurang ketelitian proses verifikasi data warga miskin di Kota Surabaya. *Kedua*, masih mudahnya mendapat Surat Keterangan Miskin (SKM) yang berlaku hanya satu kali. *Ketiga*, masih adanya pengelompokan golongan penerima kesejahteraan, sehingga tidak memenuhi aspek pemerataan dan keadilan.

Keseimbangan dalam politik bisa tercipta jika keadilan menjadi roh dalam setiap kebijakan politik. Merujuk pada masalah keadilan, *political justice* merupakan sistem diasosiasikan dengan kebajikan. Negara seharusnya berdiri di atas segala kelompok dan golongan dengan bersikap adil dan tidak memihak secara politik. Tidak seharusnya negara yang diwakili pemerintah bekerja hanya untuk kelompok tertentu dan menyingkirkan kelompok lain yang berseberangan pandangan politik dengan cara-cara ketidakadilan dengan menggunakan atau memperlakuk infrastruktur negara seperti lembaga-lembaga negara yang seharusnya hanya bekerja untuk negara, mengabdikan kepada negara dan hanya melakukan kepentingan negara. Negara yang diwakili oleh pemerintah sudah sepatutnya menjadi

kekuatan yang harus menegakkan hukum untuk keadilan, bukan justru menyiasati *political justice* demi kepentingan kelompok tertentu. *Political justice* peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka keadilan politik sebagai barometer untuk menimbang semua persoalan moral, masalah tingkah laku yang baik maupun buruk. *Political justice* merupakan keadilan yang murni, mendetail dan netral, tidak timpang karena kepentingan kelompok atau pun kelas-kelas.

Political justice seharusnya menjadi alat perlindungan negara untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Faktanya, Implementasi BPJS PBI belum memadai sebagai bentuk *Political Justice*. Hal ini karena ketidakadilan masih tersebar tidak merata di ruang nasional. Di sejumlah provinsi masyarakat umum masih miskin atau kurang merata, sementara di provinsi-provinsi lainnya pembangunan telah cukup merata, meskipun demikian juga provinsi-provinsi lainnya telah menyaksikan suatu perkembangan ketidakadilan yang cepat. Dengan kata lain, penjumlahan tingkat ketidakadilan secara nasional telah gagal menangkap pola-pola geografis dari ketidakadilan yang relevan secara politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S (2013) Teori keadilan John Rawls kritik terhadap demokrasi liberal. *Jispo*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.15575/jispo.v1i1.710>
- Basuki EW, Sulistyowati RN, & Herawati (2016) Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang, 1–11.
- BPJS Kesehatan (2018) Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia. Diakses 10 Juni 2019, dari <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2013/4>
- Cahyandari D, Istislam, & Hamidi J (2015) Hak monopoli negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial perspektif negara kesejahteraan. *Jurnal Hukum*, 1–26.
- Fisk M (1989) *The State and Justice: An essay in political theory*. Radical Philosophy Review of Books. USA: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.5840/radphilrevbooks199132>
- Godwin W (1793) *An Enquiry Concerning Political Justice*, Vol I, I(Book I), 1–323.
- Kurnia TS (2013) *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Nasution BJ (2014) Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Yustisia*, Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014.
- Putri AE (2014) *Paham SJSN: Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta: Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
- Salim Z & Dartanto T (2013) Menggapai kesejahteraan bersama melalui sjsn: bisakah dengan payung robek? *Kajian Kebijakan The Habibie Center*, (June).
- Vyandri, M. A. (2016). Implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(2), 343–354.



JPI **JURNAL POLITIK
INDONESIA**
Indonesian Journal of Politics
Managed by Department of Political Science
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Airlangga

